

No. 19 Th. VI Agustus 2006

Swara **Rahima**

Media Islam untuk Hak-Hak Perempuan



**Perempuan
Merdeka,
Benarkah?**

Daftar Isi

SALAM	1	30 AKHWATUNA	Mendefinisikan Kemerdekaan Bagi Perempuan <i>Oleh Leli Nurohmah</i>
ABSTRAK	3		
FOKUS	6	32 JARINGAN	MGMP Wadah untuk Pemberdayaan Guru
Membebaskan Perempuan Merayakan Kemerdekaan			
OPINI	11	34 KIPRAH	<ul style="list-style-type: none">● Dakwah Kesetaraan Melalui Sholawat dan Buku● Tadarus Kesetaraan bersama Guru Agama SMU di Jember
KEMERDEKAAN Hak Dasar Setiap Manusia <i>Wawancara dengan</i> Ibu Prof. Dr. Saparinah Sadli			
Agama itu Membebaskan Wawancara dengan Dr. Zaitunah Subhan	15	37 INFO	Ketika Kalla Menyampaikan Fatwa
TAFSIR AL-QUR'AN	19	38 KHAZANAH	Menggali Tradisi Nabi Membela Perempuan
Kemerdekaan Perempuan <i>Oleh KH. Husein Muhammad</i>			
DIRASAH HADIS	22	40 CERPEN	Prasangka <i>Oleh Alda Kusuma</i>
Merdeka dari Perbudakan Modern <i>Oleh Ustadz Faqihuddin Abd. Kodir</i>			
FIKRAH	26	42 TANYA JAWAB	Dapatkah "Talakh" Jatuh dalam Keadaan Marah? <i>Oleh K.H. Muhyiddin Abdush Shomad</i>
Dua 'Aisyah: Perempuan Penafsir al-Qur'an <i>Oleh Nur Achmad</i>			
TEROPONG DUNIA	28	45 REFLEKSI	Sudahkah Perempuan Merdeka? <i>Oleh Maman A. Rahman</i>
Jalan Menuju Kemerdekaan Pengalaman Perempuan Kuwait			

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembaca yang budiman,

Kali ini *Swara Rahima* hadir kembali di hadapan pembaca dengan mengangkat tema yang tidak kalah seru dengan edisi- edisi sebelumnya. Kebetulan *Swara Rahima* edisi 19 ini terbit bertepatan dengan bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu bulan Agustus. Oleh karena itu Redaksi dalam rapatnya memutuskan untuk mengangkat tema perempuan dan kemerdekaan sebagai topik pembahasan dalam edisi kali ini.

Mengapa perempuan dan kemerdekaan? Perempuan dalam kehidupan ini seringkali masih terbelenggu. Heroisme peringatan kemerdekaan yang gegap gempita seringkali masih sebatas perayaan simbolis dan karenanya tak menyentuh persoalan-persoalan perempuan yang mendasar. Kemerdekaan dari penjajahan di bumi nusantara seringkali masih diwarnai ironisme. Bagaimana tidak?

Di usia yang ke 61 ini bahkan masih saja terdapat kelompok-kelompok yang mencoba menodai makna kemerdekaan ini dengan berupaya meminggirkan kaum perempuan. Mereka bahkan seringkali berkedok agama dan menggunakan alat kekuasaan. Inilah yang harus kita waspadai. Agama sejak semula telah membebaskan perempuan dari segala belenggu penjajahan jahiliah. Agama mengakui kedaulatan perempuan sebagai manusia seutuhnya. Oleh karenanya agama bersuara keras ketika masyarakat jahiliah dahulu mengubur mereka dan menjadikan mereka sebagai barang warisan. Semangat membebaskan inilah yang harus kita

hidupkan dari agama untuk mengisi kemerdekaan bangsa kita.

Renungan inilah yang akan menjadi fokus bahasan *Swara Rahima* kali ini. Pembahasan topik ini juga kami sajikan dari berbagai perspektif. Untuk mengkaji lebih jauh makna kemerdekaan dan kaitannya dengan perempuan dari perspektif agama, pembaca secara lebih rinci akan bisa menikmatinya di rubrik Dirasah Tafsir dan Hadis yang diasuh oleh dua tokoh agama yang kompeten, yaitu KH. Husein Muhammad dan K. Faqihuddin Abdul Kadir, MA.

Selain itu kami juga menyajikan wawancara khusus dengan dua tokoh perempuan di Indonesia yang mengupas tema kemerdekaan dan perempuan. Mereka adalah Prof. Dr. Saparinah Sadli, guru besar filsafat dan mantan ketua Kajian Wanita Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, dan Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitunah Subhan, Staf Ahli Menteri Bidang Agama Kementerian Pemberdayaan Perempuan.

Di samping tema kemerdekaan, kami juga menyajikan rubrik-rubrik lain yang bisa pembaca nikmati, seperti kiprah, fikrah, info, cerpen, tanya jawab agama, dan lain-lain. Tidak ketinggalan pula, kami juga mengundang salah satu alumni pelatihan madrasah Rahima untuk menulis rubrik jaringan. Rubrik ini kami sediakan sebagai wahana publikasi jaringan-jaringan Rahima di daerah.

Dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kesetaraan, *Swara Rahima* berusaha menampilkan berbagai informasi tentang perempuan dan Islam. Merdeka! Selamat membaca..

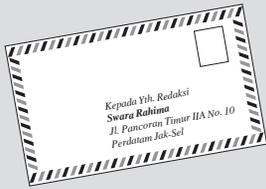
Redaksi

Swara
Rahima

Jl. Pancoran Timur IIA No. 10 Perdatam Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telp. 021-7984165 Fax. 021 - 7982955 Hp.08121046676
Email:rahima2000@cbn.net.id, Website: www.rahima.or.id

PENANGGUNG JAWAB Hj. Djudju Zubaidah **PEMIMPIN UMUM** KH. Husein Muhammad **PEMIMPIN REDAKSI** Farha Ciciek **DEWAN REDAKSI** Wahyu Budi Santoso, A.Dewi Eridani, Syafiq Hasyim, AD. Kusumaningtyas, Helmy Ali, Leli Nurohmah, Nur Achmad, Faqihuddin Abdul Kodir. **REDAKTUR PELAKSANA** Umdah el Baroroh **SEKRETARIS REDAKSI** Yohana Fijriah, **DEWAN AHLI** Prof.Dr. Saparinah Sadli, KH. Muhyiddin Abdussomad, Nyai. Hj. Nafisah Sahal, Prof. Dr. Azyumardi Azra, Kamala Chandra Kirana, MA, **ABSTRAK ARAB** Dr. Muhibb Abdul Wahab, MA. **ABSTRAK INGGRIS** Deanne Whitfield, **KARTUNIS** Mufidz Aziz **DISAINER GRAFIS** mars. **PUSDOK** Ulfah MH, **KEUANGAN** M. Syafran **DISTRIBUSI** Imam Siswoko, Sanim, Ade Irawan **JARINGAN** Mahrus eL-Mawa (Cirebon), Emma Marhumah (Yogyakarta), Hj. Ida Nurhalida (Tasikmalaya), Hj. Ruqayyah Ma'shum (Bondowoso), Hindun (Mataram), Zohra A. Baso (Makasar).

SWARA RAHIMA adalah majalah berkala terbitan Yayasan RAHIMA untuk memenuhi kebutuhan dialog dan informasi tentang Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA berusaha menghadirkan fakta dan analisis berita, serta wacana Islam dan hak-hak perempuan. SWARA RAHIMA mengharapkan partisipasi pembaca melalui saran dan kritik. SWARA RAHIMA juga menanti kiriman tulisan untuk Rubrik khazanah dan cerpen dari pembaca, bagi yang dimuat diberi imbalan.Redaksi berhak untuk mengedit naskah dan tidak memuat tulisan yang tidak sesuai dengan visi misi SWARA RAHIMA.



Bravo Buat SWARA RAHIMA!

Dear SWARA RAHIMA (SR). Aku adalah salah satu pembacamu yang setia. Kehadiranmu menambah pengetahuanku akan hak-hak perempuan, terutama bila dikaitkan dengan agama yang juga menjadi salah satu kepedulianku selama ini. Tema-tema sudah sangat kontekstual dan relevan. Menurutku isi SR sangat ringkas dan padat dan informatif, sehingga membantu pembaca yang tidak memiliki kemampuan untuk membaca buku-buku teks dengan tema-tema terkait. Ini terkait dengan pembaca muslim yang ingin praktis namun *up to date*, ataupun kalangan nonmuslim yang membutuhkan informasi tidak terlalu berat tetapi cukup informatif. Meski terkadang aku menganggap bahwa pokok bahasan cukup berat, tetapi imbangannya beberapa tulisan dengan wawancara atau berita cukup membantu.

Kalau boleh aku usul, sebaiknya SR juga menyediakan tambahan rubrik, misalnya setiap terbit memunculkan tokoh dan pemikiran perempuan dalam Islam, bisa saja terkait dengan tema. Rubrik potret bagus untuk dipertahankan, karena bisa memberikan informasi perkembangan dalam lingkup

yang luas, apalagi kalau bisa menjangkau informasi dari daerah-daerah yang tidak pernah terekspos, baik untuk wilayah potensi gender bias ataupun potensi liberatif. Tema-tema mengkhususkan untuk Islam dan hak-hak perempuan memang sangat strategis, namun mungkin SR juga bisa mengeksplorasi tema-tema yang perlu mendapat perhatian untuk kepedulian terhadap pluralitas baik di kalangan Islam sendiri maupun pluralitas yang lebih luas. Oke, itu saja komentar dan masukanku. Kutunggu kehadiranmu dan bravo selalu untuk SR!

Salam,

Iswanti - Jakarta

Salam sejahtera juga buat Mbak Iswanti. Kami senang mendengar komentar dan masukannya. Kami juga ingin bahwa kehadiran kami benar-benar menjadi rahmatan lil 'aalamiyen. Mudah-mudahan isi dan tampilan SR pada edisi-edisi mendatang senantiasa menjadi lebih baik dan menjawab kebutuhan para pembacanya.

KIRIM CERPEN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Redaksi SWARA RAHIMA yang terhormat, kami mencoba ikut mengisi majalah ini dengan mengirimkan sebuah tulisan untuk Rubrik Cerpen. Apabila cerpen kami tidak layak muat mohon kami diberi masukan, sehingga untuk penulisan selanjutnya bisa lebih baik. Demikian dari kami. Atas

perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami,
Abdul Latief
Cililitan Kecil, Kramat Jati
Jakarta Tmur.

Wa'alaikum Salam Warahmatullahi Wa Barakaatuh.

Mas Latief yang baik. Dengan senang hati kami telah menerima kiriman cerpen anda. Namun karena keterbatasan rubrik dan jumlah halaman, maka kami hanya dapat menayangkan satu judul cerpen pada setiap terbitan. Tulisan yang sudah masuk, akan disimpan oleh Redaksi sebagai bank data tulisan. Bila tulisan tersebut sesuai dengan ketentuan rubrik (cerpen maksimal 1500 kata) maupun misi majalah SR sebagai media yang mengangkat persoalan di seputar isu Islam dan Hak-hak Perempuan; maka tidak menutup kemungkinan bila suatu saat akan kami terbitkan. Teruslah menulis, perbaiki tata bahasanya sehingga sesuai dengan EYD, insyaallah Mas Latief dapat memulai langkah untuk menjadi penulis besar. Lanjutkan perjuangan!

*Wassalam,
Redaksi SR.*

Kritik dan saran
bisa disampaikan
lewat SMS ke No. HP
Rahima
08121046676

Kemerdekaan adalah hak setiap orang. Penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi. Tak ada seorang pun yang berhak menguasai atau mendominasi ras, suku, agama, atau jenis kelamin tertentu. Hal ini bukan saja menjadi kesepakatan PBB dalam deklarasi HAM, tetapi juga telah menjadi misi bersama seluruh agama-agama suci di dunia.

Islam melalui sosok Nabi Muhammad juga telah meneguhkan arti kemerdekaan itu bagi umatnya. Sejak awal mula Ia datang membawa risalah kenabian ke muka bumi ini pesan yang Ia bawa adalah tauhid. Arti tauhid yang berarti mengesakan Allah mempunyai konsekuensi terhadap penafian atas segala sesuatu selain-Nya. Ini artinya tak ada seorang pun di muka bumi ini yang berhak memperhamba atau memperbudak manusia, kecuali hanya Allah, sang pencipta.

Tuhan memberikan kemerdekaan sepenuhnya kepada manusia untuk menggunakan akal dan pikirannya dalam menjalankan misi kemanusiaannya sebagai khalifah Tuhan di bumi, karena Allah telah menciptakan manusia dalam bentuknya yang paling sempurna (*fi absan taqwin*). Dengan kesempurnaan itu Tuhan mempercayakan tongkat kekhilafahan kepada manusia, bukan kepada makhluk lain. Dalam firmanNya pada Al Baqarah:30 Allah berkata: “Dan ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat bahwa akan Aku jadikan di bumi seorang khalifah...”Kepercayaan ini tentu sebuah anugrah tapi sekaligus juga ujian. Memegang tanggung jawab itu berarti manusia harus mampu menyemai kebaikan dan perdamaian di muka bumi. Kedzaliman, penganiayaan, diskriminasi harus terus “diperangi” oleh setiap manusia yang mengaku sebagai wakil Tuhan.

Semangat inilah yang ikut menginspirasi bangsa Indonesia untuk mengusir penjajahan yang berpijak di bumi Indonesia selama ratusan tahun itu. Penjajahan dengan dalih apapun tidak bisa dibenarkan oleh naluri kemanusiaan. Penjajahan harus dilawan! Kemerdekaan harus terus diwujudkan! Kini kemerdekaan itu telah 61 tahun berlalu. Bangsa Indonesia telah mampu berdiri tegak

membawa kehormatan negerinya.

Kita memang perlu bangga dengan itu semua. Tetapi benarkah kemerdekaan yang sejati itu telah diraih oleh bangsa Indonesia? Belanda memang sudah tak lagi menginjakkan kakinya di bumi Indonesia. Tapi apakah itu berarti penjajahan telah hapus dari bumi Indonesia? Jika ya, mengapa bangsa Indonesia yang telah 61 tahun merdeka tak kunjung sejahtera. Mengapa jutaan anak tak mampu sekolah? Mengapa jutaan perempuan mati karena tak mampu membayar obat di klinik? Mengapa ratusan TKW itu pulang dengan penganiayaan yang tak berujung? Di manakah kedaulatan Indonesia yang katanya telah merdeka itu?

Kemerdekaan seharusnya juga mampu memberikan hak yang sama kepada sesama warga, tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, maupun agama, karena negeri ini telah dibangun secara bersama. Bukan hanya lelaki yang gugur dalam membela bangsa ini. Perempuan juga telah mengorbankan jiwa dan raganya dalam mempertahankan negeri ini. Mereka ikut andil dalam mewujudkan kemerdekaan itu. Tetapi makhluk berjenis kelamin ini seringkali masih belum mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kebijakan negara sering tidak berpihak kepada mereka. Padahal perempuan adalah penduduk mayoritas di negeri ini. Mereka bahkan menjadi donatur devisa terbesar bagi negaranya. Namun kenyataannya, perempuan masih mendapatkan perlakuan diskriminatif di negerinya sendiri. Kebebasan berekspresi mereka sering dirampas. Hak berserikat mereka sering dibatasi. Padahal kebebasan mereka diakui oleh Undang-Undang. Pendiri bangsa ini dengan tegas telah menolak segala bentuk diskriminasi atas dasar apapun. Bangsa Indonesia, laki-laki maupun perempuan, mempunyai kedudukan yang sama di negeri ini.

Dalam usianya yang ke 61 ini bangsa Indonesia harus merenungkan kembali arti kemerdekaan itu. Apa yang telah dipersembahkan oleh para pejuang, perempuan maupun lelaki, tak boleh musnah sia-sia, tapi semakin mekar berseri. ❀

elbaroroh.

Independence is the right of every human being. Colonization must be eliminated. No body has the right to control or dominate another race, ethnic group, religion, or gender. This is not only a UN agreement for the declaration of human rights, but also the mission of all world religions.

Through Prophet Muhammad, Islam emphasized the meaning of independence to its adherents. The Prophet delivered the holy text to this earth and the message of belief in one God (*tauhid*). *Tauhid*, which acknowledges the oneness of God, signifies that there is none greater than God. Therefore, there is no single being on this earth that has the right to enslave others, except for Allah, the creator.

God created human beings in the most perfect form (*fi absan taqwim*) and granted them independence to make use of their intellect and thoughts in undertaking their mission as God's representatives (*khalifah*) on earth. God entrusted the reins of leadership on earth to human beings, not to other creatures. In one of God's commandments - from Albaqarah: 30 - God said to the angels: "I will create a vicegerent (*khalifah*) on earth..." This is certainly a blessing from God, yet at the same time also a test. With this huge responsibility humankind must succeed in seeding goodness and peace on earth. If we acknowledge that we are indeed God's representatives on this earth, then every one of us should wage a war against oppression, mistreatment, and discrimination.

This kind of enthusiasm is what inspired the Indonesian nation to expel the colonizers that had controlled Indonesia for hundreds of years. Colonization, under any pretext, is not justified in nature. We must oppose colonization and continue to strive for independence! It has been 61 years since Indonesia gained its independence. The Indonesian nation has stood tall in bringing honour to the country.

We should be proud of this. But, can we conclude that the Indonesian nation has achieved 'true'

independence? The Netherlands government no longer has authority on Indonesian soil, yet does this mean that colonization has been totally abolished in Indonesia? If so, why then has the Indonesian nation, after 61 years of independence, failed in becoming prosperous? Why are millions of children deprived of education? Why do millions of women die because they cannot afford medical treatment? Why are there continually hundreds of migrant workers (TKW) that return home after being abused during their term of employment overseas? Where is the Indonesian sovereignty that we claim to have already achieved?

Independence should afford equal rights to every citizen, without discriminating between gender, ethnic group, race, or religion. Our country was developed collectively and it is not only men that have fallen in defending the nation. Women too have sacrificed their souls and physical bodies in defending our nation and have contributed to bringing about independence. Yet, in reality women are not always granted their independence. Even though the majority of Indonesia's population is comprised of women and women continue to be major contributors to foreign exchange in our country, government policies very rarely support them. The fact remains that women continue to be discriminated against in their own country. Even though the law acknowledges women's liberty, their freedom for expression is often limited and their united rights often restricted. The founder of our nation fervently rejected all forms of discrimination. The men and women of our nation should share the same status.

In this, its 61st year of independence, the Indonesian nation must reflect on the real meaning of independence, so that the uphill struggle of former freedom fighters - both male and female - was not carried out in vain. Nevertheless, the meaning of independence should continue to blossom in our beautiful homeland of Indonesia. ❀

إن الاستقلال حق لكل إنسان، وإن كل استعمار على وجه الأرض لا بد من مَحْوِهِ. ولا أحد مستحق أن يسيطر أو يهيمن على قدر معين من الكيانات العنصرية، والقبلية، والدينية، والنوعية. وليس محو الاستعمار قرارا أصدرته هيئة الأمم المتحدة بشأن إعلان حقوق الإنسان فحسب، وإنما قد أصبح أيضا رسالة مقدسة من رسائل أديان العالم.

وقد أثبت الإسلام من خلال قدوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مغزى الاستقلال لأمته. ومنذ أول وهلة جاء الإسلام في هذا العالم بالرسالة النبوية التي تدعو إلى توحيد الله. ومعنى التوحيد هو تصديق بوحداية الله وإقرارها ونفي كل إله سواه. يعنى ذلك أنه لا أحد مستحق أن يُعْبَدَ أو يستعبد الإنسان، ولا معبود إلا الله، خالق السموات والأرض.

أنعم الله تعالى على الإنسان حرية كاملة لإعمال عقله في تحقيق رسالته الإنسانية باعتباره خليفة الله على الأرض؛ لأن الله قد خلقه في أحسن تقويم. وبذلك كلفه الله أمانة الخلافة دون غيره من المخلوقات، فقال تعالى: "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة..." (البقرة: ٣٠). وهذه الأمانة منحة ومحنة على حد سواء. ويقتضي تحمّل هذه المسؤولية أن يقدر الإنسان على تجسيد الحريات والسلام الدائم على الأرض، في حين يجب عليه أن يحارب دائما الظلم، والاعتداء، والطغيان، والتمييز.

وتلك الروح هي التي قد ألهمت الشعب الإندونيسي شجاعة الاستعمار وطرده من أنحاء إندونيسيا طوال مئات السنين. لأن الاستعمار بأي مبرر كان لا يمكن أن يرتضيه الضمير الإنساني. فالاستعمار لا بد من محاربه إينما الاستقلال لا بد من الحفاظ على بقائه. وقد مضى استقلال إندونيسيا لفترة زمنية مدتها ٦١ سنة. وقد قدر الشعب الإندونيسي على القيام بمحمل عزته ومروءته. نجد أنفسنا في حاجة إلى الاعتزاز بعزتنا، ولكن نتساءل: هل الشعب الإندونيسي قد أُنجز الاستقلال الحقيقي؟ صحيح أن الهولانديين قد تركوا وأخرجوا من أرض إندونيسيا، ولكن لا يعنى ذلك أن الاستقلال قد تلاشى من إندونيسيا. فإذا صح القول بأن بلادنا قد استقلت منذ ٦١ سنة، فلماذا لم يتمتع الشعب الإندونيسي بالرفاهية والرخاء؟ ولماذا لا يقدر الملايين من أبناء الشعب على تلقي التربية والتعليم؟ ولماذا توفيت الملايين من النساء نتيجة عجزهن عن دفع ثمن الأدوية في المستوصفات؟ ولماذا عادت معظم النساء من القوى العاملة الإندونيسية من خارج البلاد إلى داخلها وهن دائما يعانين من الظلم؟ فإين موضع دولة إندونيسيا المستقلة؟

ومن المفروض أن الاستقلال يمنح لكل مواطن حقه على قدم المساواة دون تمييز نوع دون نوع، و قبيلة دون قبيلة، وعنصر دون عنصر، ودين دون دين، لأن هذه البلاد تم بناؤها- ولا يزال -بشكل مشترك. فاجاهدون المتوفون في سبيل استقلال هذه البلاد ليسوا من الرجال فقط دون غيرهم من النساء، وقد أثبت الواقع أن النساء شاركن أيضا في تضحية أنفسهن وأموالهن من أجل الدفاع عن استقلال هذه البلاد، كما شاركن في تحقيق استقلالها. غير أن النساء الإندونيسيات لم يتمتعن بالاستقلال الحقيقي إلى درجة كبيرة. ذلك لأن بعض سياسات الدولة لا تحايد ولا تؤيد المرأة، والحق أن المرأة قد أسهمت إسهاما كبيرا في تقديم الدخل القومي للدولة. وأثبت لنا الواقع أن المرأة لا تزال تتلقى المعاملات السيئة من التمييز والظلم والعنف وما شابه ذلك. وحرية المرأة في التعبير عن آرائها في غالب الأحيان مغسوبة، وحق الانتماء والاشتراك لها محدود، في حين أن حريتها يعترف بها القانون. وقد رفض معلن استقلال إندونيسيا بصراحة أي نوع من التمييز تجاه المرأة وبأي مبرر يدعمه. والحق أن لكل أفراد الشعب الإندونيسي، رجالا كانوا أو نساء، مكانة متساوية أمام القانون.

وفي نهاية المطاف أن الشعب الإندونيسي في ميلاده الحادي والستين مطالب بوقفه تأملية في مغزى الاستقلال الحقيقي، وذلك ليس إلا من أجل جعل ما قد قدمه الجاهدون، رجالا ونساء، من الضحايا، غير عبث، ولكنه يؤدي إلى مستقبل زاهر وخير كثير لبلادنا المحبوبة.

Perempuan dalam Bayang Kemiskinan dan Kelaparan

Banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, sehingga kemiskinan yang terjadi sesungguhnya merupakan hasil dari proses pemiskinan.

Tahun 2005 ini memang tahun penuh ujian bagi bangsa Indonesia. Salah satu ujian yang pantas dikatakan sebagai ujian terbesar adalah terungkapnya berbagai kasus busung lapar di pelosok daerah. Mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, Sumatra Barat, Kalimantan, terutama Pontianak dan Papua. Untuk daerah Sulawesi terutama di daerah Kendari dan Makassar bahkan pulau Jawa seperti Situbondo, Banten, Purwakarta, Bogor, hingga Rembang. Apalagi yang hendak dikatakan kalau bukan negara Indonesia ini memang telah menjadi negara miskin karena kelaparan telah merajalela di mana-mana.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari media massa seperti Koran Tempo, Kompas, Media Indonesia dan Republika selama beberapa waktu terakhir menyebutkan bahwa balita penyandang busung lapar kurang lebih berjumlah: 66.685 di NTT, 164 di Kendari, 529 di Purwakarta, 255 di Bogor, 40 di Makassar dan 1.456 di Jawa Tengah¹. Sedangkan di propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), anak balita yang menderita busung lapar mencapai 10 persen dari total anak balita. Menurut hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), di NTB ada sekitar 498.000 anak balita. Dengan demikian, sekitar 49.000 anak balita diantaranya menderita gizi buruk atau bahkan busung lapar².

Kaitannya dengan kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di Indonesia tersebut, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pun menyebutkan data yang juga cukup mengkhawatirkan yaitu mengenai 20 juta perempuan di Indonesia yang hidup miskin. Bahkan

setelah krisis moneter jumlah perempuan miskin tersebut meningkat menjadi 40 juta orang. Lalu karena kemiskinan tersebut, dari 11 ribu kelahiran anak Indonesia setiap harinya yang lahir dari perempuan miskin tadi, 800 orang diantaranya meninggal dalam usia belum lima tahun. Nampaknya hal ini memang menjadi kenyataan pahit yang harus diterima Indonesia saat ini.

Berat memang hidup di negara yang digolongkan sebagai negara miskin di dunia. Apalagi kenyataannya bahwa kemiskinan di Indonesia bukan karena Indonesia kekurangan sumber daya alam dan sumber daya manusia, akan tetapi karena adanya proses-proses yang tidak seimbang antara pemerintah dan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Nurni Akma, banyak kebijakan pemerintah yang sesungguhnya tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, sehingga kemiskinan yang terjadi sesungguhnya merupakan hasil dari proses pemiskinan.

Menurut Wardah Hafid, pemiskinan di atas terjadi juga karena tidak adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan Wardah telah mengatakannya 12 tahun yang lalu. Kini Wardah Hafid dikenal sebagai aktivis *Urban Poor Consortium* atau masyarakat miskin kota. Ditekankan lagi oleh Wardah bahwa perempuanlah yang akan menanggung beban lebih berat lagi karena masalah kemiskinan. Bahkan seringkali perempuan pula yang menjadi pihak yang dikorbankan. Misalnya perempuan-perempuan desa akan banyak mencari lapangan kerja ke luar negeri sebagai tenaga kerja wanita (TKW), karena lahan-lahan pekerjaan di kampung telah *dicaplok* oleh para pengusaha. Maka tidak heran jika pada tahun inilah Indonesia seperti tengah menuai beragam masalah karena kemiskinan tadi; perdagangan perempuan, prostitusi, buruh migran ilegal, dll.

Berkaca kepada negara-negara muslim seperti Pakistan atau Bangladesh, kemiskinan memang masih menjadi musuh paling besar yang dihadapi. Bangladesh misalnya, negara dengan 132 juta penduduk ini bahkan disebut sebagai negara simbol kemiskinan Asia, karena 40% dari total penduduk Bangladesh hidup dibawah garis kemiskinan. Se-

dangkan sebagai negeri yang seringkali mengalami konflik perang, Pakistan adalah negeri yang juga lambat dalam upaya pengentasan kemiskinan. Apalagi pada bulan ini Pakistan mengalami musibah bencana gempa yang tentunya akan menambah angka penduduk miskin.

Islam memerangi kemiskinan

Tahun 2005 ini bisa dikatakan juga sebagai tahun perang melawan kemiskinan. Pada tahun ini berbagai bencana alam terjadi, dari bencana Tsunami yang menewaskan ribuan orang, kecelakaan, gempa, hingga badai. Semua hal tersebut adalah salah satu faktor yang juga menambah angka orang miskin di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya. Jika kita berkaca pada sejarah Islam, masalah kemiskinan memang tidak dibahas secara khusus, apalagi ditawarkan solusi dll, akan tetapi melalui Nabi, Islam pun merespon masalah kemiskinan tersebut.

Misalnya dari hadits Nabi yang mencoba menghibur orang-orang miskin, hingga memberikan spirit bahwa kemiskinan adalah hal yang harus diatasi bersama-sama. Namun Nabipun tidak pernah menistakan orang miskin. Dengan aturan zakat dan sedekah, orang miskin dalam Islam dijamin kesejahteraannya. Dari zakat dan sedekah pula sesungguhnya Allah mengatur umat-Nya untuk menerapkan pemerataan *rizki*. Tentang bagaimana Nabi memberikan spirit bahwa ada kekuatan yang luar biasa dari kaumnya yang miskin adalah dari sabdanya "Diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash r.a.; Nabi SAW pernah bersabda " Kalian tidak memperoleh kemenangan atau rizki kecuali melalui berkah dan doa orang-orang miskin di antara kalian" (Shahih Bukhari; 4;145-S.A). Selain Nabi kita juga akan mengenal Fatimah putri Nabi sendiri, lalu ada Ali *karramallahu wajhah*, Umar r.a, Abu bakar r.a, dll.

Dalam riwayat diceritakan bahwa Fatimah Azzahra, putri kesayangan Nabi SAW, tidak pernah memperlakukan orang-orang miskin dengan semena-mena. Ketika suatu hari ada seorang peminta-minta datang ke rumahnya dan harta yang dimilikinya hanyalah kalung kesayangannya, maka tanpa berat hati Fatimah memberikan kalung tersebut kepada si peminta-minta tersebut.

Berbeda dengan Fatimah, Ali *Karramallahu Wajhah*, suami Fatimah sekaligus menantu Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan selalu menanggapi masalah kemiskinan tidak hanya dengan memberikan santunan begitu saja seperti yang banyak dilakukan sahabat, akan tetapi Ali menyikapinya



dengan mengupayakan pemerataan distribusi kesejahteraan kepada kaum miskin. Karena kondisi sosial yang didapatinya ketika ia menjadi khalifah memang demikian, terutama karena ketidakadilan alokasi dana *baitul mal* yang dilakukan pemerintahan sebelumnya sehingga hampir sebagian besar lapisan masyarakat yang hidup pada saat itu berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga pada masa Ali pula warga Kufah yang paling miskinpun mampu memakan gandum, memiliki rumah, dan meminum air dari sungai Furat.³ Bahkan Khalifah Umar r.a yang dikenal sebagai sahabat Nabi yang keraspun, sangat lembut kepada kaumnya yang miskin. Sebagai Khalifah, Umar selalu melakukan patroli secara sembunyi hanya untuk mengetahui secara lebih dekat bagaimana keadaan rakyatnya.

Kemiskinan yang terjadi saat Umar r.a hidup pada akhirnya dapat kita ketahui melalui riwayat dalam sejarah klasik Islam. Misalnya kita dapat memperoleh riwayat tentang seorang ibu yang mengukus batu dalam dandangnya untuk menghibur anaknya yang kelaparan, lalu tentang dialog seorang anak perempuan yang ingin mencampur susu perahan sapi dengan air untuk menambah laba penjualan, adalah riwayat-riwayat yang akrab di telinga kita, sekaligus cermin bagaimana sesungguhnya kemiskinan telah mendapatkan respon beragam dari rakyat miskin pada jaman Umar. Umar pula yang menolong rakyatnya dengan tangannya sendiri

Pada riwayat lain Nabi Muhammad SAW bersabda: "Allah SWT tidak mewahyukan kepadaku supaya mengumpulkan harta dan menjadi pedagang tetapi Allah SWT mewahyukan kepadaku supaya bertasbih dan tahmid kepada-Nya dan selalu bersama-sama orang-orang yang sujud dan ibadatulah

kepada Tuhanmu sehingga mati (mencapai keyakinan yang sesungguhnya)". Lalu ada juga riwayat dari Abul Laits yang berkata: "Abu Ja'far meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Said Alkhudri r.a. berkata: "Ya Allah, matikan aku sebagai orang fakir miskin dan jangan dimatikan aku kaya dan kumpulkan aku di *mahsyar* dalam rombongan orang-orang miskin pada hari kiamat, maka sesungguhnya yang amat celaka ialah orang yang miskin di dunia dan tersiksa diakhirat." Ada juga Ibn Abbas r.a. yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tiap ummat ada fitnah (ujianya) sendiri-sendiri, dan ujian ummatku adalah harta kekayaan." Sedangkan Abdullah bin Umar r.a. berkata Nabi Muhammad SAW bersabda: "Sesungguhnya makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah SWT ialah orang yang fakir miskin sebab manusia yang amat dikasihi oleh Allah SWT ialah para Nabi, maka Allah SWT menguji mereka dengan kefakiran, kemiskinan."

Riwayat-riwayat di atas adalah gambaran bagaimana kemiskinan dalam Islam direspon. Bagaimana Islam menolak pemiskinan dengan aturan-aturannya dan meninggalkan orang miskin sebagai petunjuk bagi orang kaya untuk memberikan hak orang miskin dari kekayaannya. Karena Islam memang mengkonsepkan kekayaan sebagai ujian bagi manusia, bagaimana mereka mengelolanya dan menyampai-kannya kepada orang-orang yang berhak. Dalam aturan zakatlah Islam melakukan antisipasi untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran tersebut pun sesuai dengan prinsip moral dan spiritual yang dinyatakan Al-quran, "Kekayaan jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu" (Al Hasyr: 7).

Bagaimana dengan perempuan miskin

Dalam Islam, tidak ada pemilahan antara laki-laki dan perempuan yang miskin. Ajaran Islam mewajibkan untuk menolong semua orang miskin. Namun, terkadang perempuan miskin adalah pihak yang terlupa. Dalam aturan pemberian bantuan misalnya, seringkali pemberian diwakili oleh kepala rumah tangga yang berarti laki-laki (bapak). Lalu kategori anak yatim adalah mereka yang tidak memiliki ayah saja, sedangkan mereka yang piatu kurang mendapatkan perhatian.

Dalam catatan sejarah Islam banyak perempuan miskin pada jaman Nabi mengambil pekerjaan di rumah, misalnya seperti menenun, dll. Hasil kerja mereka kemudian menjadi nafkah untuk seluruh keluarga. Bahkan berkaitan dengan kemiskinan yang

dialami perempuan, masalah pekerja seks komersil dan perempuan buruh migran pun pernah menjadi bahasan pada masa Nabi, karena beberapa kasus yang muncul. Misalnya adanya riwayat Nabi yang menceritakan perempuan pezina yang mohon tobat, lalu adanya budak-budak perempuan yang bekerja di luar kampung mereka. Kasus pada masa Nabi tersebut di atas seperti juga menggambarkan bagaimana perempuan seringkali masuk pada wilayah prostitusi karena belunggu kemiskinan, pun bagaimana para perempuan mencoba berupaya mengatasi kemiskinan yang dialami dengan caranya migrasi dari kampungnya sendiri yang sudah tidak ada lowongan pekerjaan lagi. Melalui respon yang dinyatakan oleh Nabi maka sesungguhnya Islam sebagai tatanan sistem dituntut untuk dapat terus dengan menyeluruh mengurus masalah perempuan miskin. Tidak hanya dengan pemberian zakat atau sedekah namun lebih dari itu bagaimana memagari agar tidak semakin banyak lagi perempuan terjerumus pada pilihan-pilihan sulit seperti di atas tadi. Pun jika melihat kondisi sekarang, perempuan bahkan seringkali menghadapi pilihan – pilihan sulit, misalnya pada akhirnya ia harus mencuri susu demi anaknya yang kehausan.

Miskin bagi Perempuan

Mengutip Yuni Prestiwati dalam wawancara dengan redaksi beberapa waktu lalu, perempuan dikatakan miskin karena ia tidak mendapatkan hak dasar untuk hidup; hak ekonomi, hak berpendidikan, hak mendapatkan akses hingga kesempatan. Jika demikian maka perempuan miskin bukan hanya karena ia miskin secara materi saja, akan tetapi perempuan miskin karena ia miskin informasi yang pada akhirnya membatasi aksesnya untuk bertahan hidup. Tentu saja keterbatasan akses menjadikan perempuan juga terbatas ruang lingkungannya.

Pada jaman Raden Ajeng Kartini dulu, perempuan dibatasi untuk tidak berpendidikan tinggi. Namun apa yang terjadi ketika kemudian banyak perempuan berpendidikan seperti sekarang ini. Kenyataannya perempuan tidak hanya mampu membentuk generasi unggul tetapi juga menyumbangkan banyak pemikiran dan sumbangan untuk kemajuan perempuan Indonesia itu sendiri. Sebutlah misalnya R.A. Kartini sendiri, karena kesempatan yang dimilikinya, maka ia kemudian mampu memberikan pengetahuan yang lebih banyak lagi kepada perempuan yang lain.

Lalu bagaimana jika perempuan terus mengalami kemiskinan, apalagi di Indonesia ini telah terjadi

berbagai peristiwa yang semakin memperbesar angka kemiskinan. Sebutlah Diah misalnya, mantan TKW asal Mataram yang bekerja di Malaysia dan dipulangkan ke Indonesia hingga harus mengungsi di Nunukan. Diah pada akhirnya harus menerima tinggal di *camp* pengungsian yang sangat tidak sehat. Belum lagi keberadaannya yang tidak jelas membuat anak di kampungnya menjadi yatim piatu. Suami Diah pergi begitu saja dan menikah kembali dengan perempuan lain. Sedangkan anak mereka tinggal bersama orang tua Diah yang juga tidak menentu perekonomiannya.

Perempuan menjadi rentan terhadap penyelewengan, pengabaian hak dalam kemiskinannya. Masih untung Diah yang dapat tetap hidup sehat meskipun harus terkatung-katung di pengungsian. Bagaimana dengan Nani yang sekarang mengidap HIV/AIDS, penyakit yang dianggap penyakit kutukan bagi sebagian muslim. Kemiskinan telah membawa Nani menjadi korban penipuan tenaga kerja. Nani menjadi korban perdagangan perempuan dan terdampar di Batam menjadi pekerja seks. Sudah mengidap HIV/AIDS Nani kini dianggap hanya tinggal menunggu mati dan diasingkan dari komunitas.⁴

Hal yang lebih mengesankan lagi bahwa pemerintah tidak pernah memberikan perlindungan kepada perempuan miskin. Bahkan seperti yang seringkali diucapkan Wardah Hafid, seringkali pemerintah melakukan tindakan yang bukan berorientasi pada pengentasan kemiskinan tetapi memerangi orang miskin.

Strategi ke depan

Sebagai negara anggota PBB dan ikut menandatangani deklarasi Pembangunan milenium, pemerintah Indonesia seharusnya sudah harus sangat serius memberantas kemiskinan.

Berbagai elemen masyarakat Indonesia juga melakukan berbagai kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan. Pun bagi mereka sebagai organisasi non pemerintah sudah seharusnya juga mengawasi pemerintah untuk dapat terus komitmen terhadap apa yang sudah disepakatinya bersama Negara-negara anggota PBB.

Strategi Kolektif dan *massif* akan lebih efektif dilakukan oleh berbagai kalangan, baik ormas, ormas keagamaan hingga LSM yang dapat ditempuh dengan tidak hanya mendorong pemerintah melaksanakan komitmennya, tetapi pun melakukan sendiri pemberdayaan rakyat miskin. Misalnya dengan memperkuat jaringan diantara organ dan elemen yang berkonsetrasi kepada isu kemiskinan. Sedangkan

bagi ormas seperti Aisyiyah, Muslimat NU, Persistri, pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti peningkatan pendidikan dan pengetahuan perempuan, bantuan dana sosial, dll.(*dd*)

Dalam sasaran Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals/MDGs*) tersebut, Indonesia sudah harus memusatkan pada 10 sasaran utama diantaranya yang berkaitan dengan kemiskinan dan perempuan:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan dengan : a) mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang hidup dengan penghasilan kurang dari satu dollar perhari (sebagai catatan setengah dari jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan, berarti pemberantasan kemiskinan yang dialami perempuan pun menjadi pilihan utama b) mengurangi sampai setengah jumlah penduduk yang kelaparan

2. Mewujudkan pendidikan dasar bagi semua dengan menjamin agar semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan jenjang pendidikan dasar

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan menghapus ketidaksetaraan gender dalam jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005, dan di semua tingkat pendidikan pada tahun 2015

4. Menurunkan angka kematian balita dengan mengurangi dua pertiga dari angka tingkat kematian anak di bawah usia lima tahun

5. Meningkatkan kesehatan ibu dengan mengurangi tiga perempat dari angka tingkat kematian ibu

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya dengan a) menghentikan dan mengurangi laju penyebaran HIV/AIDS b) menghentikan dan mengurangi laju penyebaran malaria serta penyakit menular utama lainnya pada tahun 2020 *

¹ Data dikumpulkan dari Koran Tempo, KOMPAS, Republika, dan Media Indonesia dari 2-30 Juni 2005

² Lihat KOMPAS, Sabtu 28 Mei 2005

³ (baca dalam Sejarah Manusia Suci, www.tribe.ir/worldservice).

⁴ (ilustrasi dihimpun dari berbagai sumber salah satunya dari cerita pendamping lapang PeKKA dan Migran Care).

Pada edisi dengan tema kemiskinan kali ini, tokoh yang kami hadirkan untuk berbagi pengalaman adalah Yuni Prestiwati dan Nurni Akma. Yuni akan bicara banyak mengenai berbagai pengalaman selama bekerja bersama para pengusaha kecil di berbagai kota. Sedangkan melalui Nurni Akma, pembaca akan diajak menyelami bagaimana da'wah sosial yang selama ini dilakukan Nurni Akma melalui Aisyiyah dan lembaga-lembaga dampingannya. Berikut cuplikan wawancara yang dapat dihimpun oleh redaksi

Wawancara dengan Yuni Prestiwati

Perempuan Miskin Akan Terbatas Kemampuannya untuk Bertahan Hidup

Aktivis yang sehari-hari menemani para perempuan pengusaha kecil ini bernama lengkap Yuni Prestiwati. Yuni Lahir di Malang pada tanggal 6 Januari 1966. Setelah lulus dari IKIP Malang, Yuni melanjutkan studi ke S2 UI jurusan ilmu politik. Yuni kini memiliki satu anak angkat dan aktif di Asosiasi Pendampingan Perempuan Pengusaha Kecil.



Swara Rahima (SR) :

Apa kritik mbak Yuni terhadap beberapa definisi kemiskinan ?

Yuni Prestiwati (YP):

Ya! Menurut saya sebenarnya tidak salah juga. Artinya itu sangat tergantung. Pada wilayah-wilayah tertentu memang mungkin untuk mendefinisikan seperti itu. Akan tetapi yang lebih penting adalah definisi kemiskinan itu harus didefinisikan juga bersama masyarakat atau bersama perempuan.

Mereka sendiri juga yang harus mendefinisikan. Karena definisi yang ada sekarang ini adalah pendapat dari para ahli yang kemudian di adopsi oleh pemerintah dan sebagainya. Padahal masyarakat bisa mendefinisikan dunianya sendiri, mereka merasa miskin atau kurang miskin dan sebagainya.

Kira-kira komentar yang muncul ketika masyarakat merasa miskin itu ketika apa?

Orang akan merasa miskin misalnya ketika kemarin orang bilang krisis dan sebagainya. Salah satunya yang paling gampang dikatakan memang dengan ukuran materiil tadi. Kalau mereka tidak bisa makan sama sekali pasti mereka miskin. Tapi kalau diingat lagi tentang hak dasar, tentunya hak dasar bukan hanya masalah makan saja, justru yang terpenting adalah akses dan kesempatan. Karena hambatan akses masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan hak-hak dasarnya dari pemerintah misalnya hak kesehatan, politik dll. Harus ada kajian ulang terhadap kemiskinan itu sendiri. Saya kira sebagian teman-teman sudah membantu pemerintah membuat desain yang strategis untuk kemiskinan, Misalnya GAPRI, dan PRSP.

Menurut Mbak siapa dan seperti apa sebe-

narnya yang dimaksud perempuan miskin?

Yang kami fahami tentang perempuan miskin adalah para perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya. Baik hak dasar ekonomi, hingga terputusnya akses untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kebanyakan dari mereka tidak mendapatkan pendidikan yang cukup, bahkan pendidikan dasar yang dijanjikan gratis oleh pemerintah. Lalu juga kurang terpenuhinya hak dasar kesehatan, apakah karena disebabkan kurang akses terhadap layanan kesehatan, tidak mampu atau karena jangkauan wilayah. Bahkan untuk mendapatkan informasi kesehatanpun sangat minim. Sehingga yang terjadi adalah perempuan menjadi sangat terbatas secara ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan yang pada akhirnya membatasi kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Terlebih adanya anggapan negatif tentang perempuan yang tidak terlalu memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Perempuan biasanya lebih mengutamakan keluarganya termasuk anaknya dibanding dirinya

Bagaimana Perempuan Mengatasi kemiskinan?

Perempuan mengatasi kemiskinan salah satunya dengan mencoba melakukan berbagai usaha sendiri. Selain juga ada yang menjadi buruh atau pekerja, akan tetapi banyak juga perempuan misalnya yang kemudian membuka usaha kecil-kecilan di rumahnya. Dengan membuka usaha sendiri, apalagi jika usaha tersebut di lakukan di rumah, maka perempuan akan lebih leluasa mengatur pekerjaan rumah tangga yang biasanya juga dibebankan kepadanya.

Karena hambatan akses masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan hak-hak dasarnya dari pemerintah misalnya hak kesehatan, politik dll. Harus ada kajian ulang terhadap kemiskinan itu sendiri.

Sebenarnya dari fenomena seperti itulah ASPPUK ada.

Mbak Yuni sekarang aktif di ASPPUK, dapat diceritakan tentang ASPPUK?

ASPPUK adalah kepanjangan dari Asosiasi Pendampingan Perempuan Pengusaha Kecil. Jadi kami sebenarnya sebuah jaringan NGO terutama NGO dengan fokus dan aktifitas kepada penguatan perempuan yang bekerja di sektor usaha kecil. Karena bila di bilang kecil tentunya itu menurut ukuran pemerintah saja bukan ukuran dari kita. Saya sendiri adalah sekretaris yang menjaga kesekretariatan ASPPUK di Jakarta. ASPPUK tersebar di 16 propinsi diantaranya di wilayah Jawa, wilayah Sumatera, wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Kalimantan. Sementara anggota yang menjadi jaringan ASPPUK berjumlah 56 NGO yang tersebar di wilayah-wilayah tadi. Visi kami adalah memfasilitasi terbangunnya sebuah gerakan perempuan usaha kecil untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dan kesetaraan gender. Visi tersebut dirumuskan sendiri oleh para perempuan pengusaha kecil tadi. Dari visi tersebut ASPPUK menetapkan misi untuk turut serta memfasilitasi NGO anggota dan memfasilitasi terbangunnya gerakan bebas itu sendiri melalui kegiatan penguatan pengorganisasian, advokasi dan pengembangan media.

Bagaimana perempuan pengusaha mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah?

Salah satu strategi yang dilakukan oleh perempuan pengusaha kecil untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah adalah melalui advokasi. Fokus advokasi sendiri adalah kepada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada sistem mikro bisnis yang dikelola oleh perempuan dan penguatan perempuan sendiri. Jadi adanya asosiasi seperti ASPPUK akan sangat berperan membentuk perempuan sebagai subyek dalam sistem perekonomian dan juga perempuan sebagai individu dalam usaha mikro dan dalam berbagai aktifitas yang digelutinya. Nah untuk kebijakan yang terkait dengan desentralisasi pemerintahan maka fokus advokasi tersebut ada di daerah-daerah. Misalnya asosiasi membangun aliansi dan pelatihan-pelatihan untuk perempuan usaha kecil yang akan mendorong mereka untuk melakukan *lobbying* dengan pemerintah di tingkat kabupaten/kota.

Apa sih definisi usaha kecil (mikro)? contoh-

nya seperti apa?

Kalau kita lebih fokus pada usaha mikro, maka usaha mikro itu jika dilihat asetnya yang memenuhi batas tidak lebih dari Rp10.000.000,00. Usaha tersebut juga dilakukan dan juga di kelola dengan pengambil keputusannya adalah perempuan. Kami mencoba mendorong para perempuan tersebut untuk dapat terus mengambil manfaat bagi dirinya sendiri. Profil yang ada sekarang misalnya para perempuan yang melakukan usaha kecil dengan rata-rata usianya 20-45 dan 50 tahun. Pendidikan mereka rata-rata SD dan ada juga yang lulus SMP. Secara ekonomi kebanyakan dari perempuan pengusaha kecil pun masih tergolong miskin, dalam artian mereka masih belum mendapatkan hak dasarnya, baik hak berpendidikan, hak kesehatan, hingga hak untuk bersuara. Dari survey terbatas yang saya lakukan, 86% dari perempuan pengusaha kecil tidak pernah mendapatkan akses perbankan, bahkan mereka tidak pernah mendengar institusi bank, sehingga mereka tidak pernah berani atau tidak mengerti informasi mengenai perbankan.

Apa saja biasanya bidang usaha perempuan pengusaha kecil?

Mayoritas mereka adalah melakukan perdagangan di pasar maupun di rumah. Ada juga yang membuka usaha konveksi, jasa salon, hingga pertanian. Kalau untuk wilayah Sumatera mayoritas melakukan kegiatan pertanian dan usaha-usaha tani.

Mengapa perlu ada pemberdayaan terhadap perempuan pengusaha kecil?

Saya kira pilihan ini adalah bagian dari strategi. Karena kami melihat akses perempuan yang sangat rendah sehingga penguatan terhadap perempuan akan memiliki dampak yang tentunya bukan hanya untuk mereka sendiri tapi berdampak pada keluarga. Kredit, kesehatan, maupun program-program pendidikan diberikan kepada perempuan agar dampak yang muncul menjadi dampak ganda, karena perempuan berinteraksi dengan anaknya yang dan dekat dengan lingkungannya.

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan selama ini?

Sejauh ini kami melihat bahwa yang ada di Indonesia adalah kemiskinan yang memang benar-benar akibat dari orientasi kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seringkali tidak berorientasi kepada



kepentingan rakyat. Saya kira sampai hari ini pun jumlah hutang negara kita masih begitu besar. Namun pemerintah tidak pernah mencoba melakukan tindakan yang konstruktif seperti penghapusan hutang dan sebagainya. Bila kita melihat APBN, 42 - 43% hanya dipakai untuk membayar hutang. Padahal kebutuhan pembangunan untuk pemenuhan hak-hak rakyat sama sekali tidak terpenuhi, seperti untuk pemenuhan biaya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Hal ini jelas menunjukkan kebijakan pemerintah sendiri tidak konstruktif dalam memecahkan masalah kemiskinan ini. Terlalu banyak program-program atau proyek-proyek, akan tetapi sayangnya proyek-proyek tersebut tidak menyentuh pada persoalan mendasarnya.

Apa dampak kebijakan yang berakibat kepada usaha kecil perempuan?

Pemerintah seringkali membicarakan program kemiskinan dengan sangat karitatif, tidak memberdayakan. Di situlah sesungguhnya kelemahan kebijakan kita. Belum lagi *overlapping* kebijakan di semua dinas pemerintah dengan melakukan hal yang sama tetapi tidak jelas sasaran, atau tidak tepat sasaran. ❁

Wawancara dengan Nurni Akma

Organisasi Perempuan Islam

sebagai jawaban bagi persoalan kemiskinan

Ibu beranak empat dengan nama lengkap Nurni Akma ini lahir di Maninjau Sumatera Barat, pada 27 April 1948. Sejak muda sudah aktif di Nasyiatul Aisyiah lalu aktif juga di Aisyiyah hingga mendapatkan gelar sarjana di Yogyakarta. Pernah melanjutkan ke jenjang master jurusan Psikologi di Universitas Indonesia namun tidak dapat menyelesaikan tesis hingga harus berhenti namun melanjutkannya ke Universitas Islam Djakarta (UID) jurusan kajian Islam dan sedang menyelesaikan karya terakhir.

Sejak tahun 1985 hingga tahun 2000 sudah menjadi Ketua Wilayah dan pada tahun 1995-2005 menjadi Ketua Pimpinan Pusat Aisyiah bagian PKS (Pembinaan Kesejahteraan Sosial) dengan anak asuh lebih dari tiga ratus anak.

Swara Rahima (SR) :

Apa tanggapan ibu tentang angka kemiskinan di Indonesia yang terus meningkat?

Nurni Akma (NA) :

Menurut saya sesungguhnya kemiskinan di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan struktural. Jika dibandingkan dengan negara yang lain di Asia, sebenarnya Indonesia tidak pantas dikatakan negara miskin. Indonesia sesungguhnya adalah negara kaya yang salah urus. Jika mengutip pepatah rakyat Indonesia 'laksana ayam yang mati dilumbang padi'. Saya mengatakan demikian karena Indonesia memiliki laut yang luas penuh dengan ikan bergizi. Hanya saja karena salah urus tadi maka ada kasus pencurian kayu dan pencurian ikan. Hal yang kedua yang ingin disampaikan di sini adalah Indonesia kita adalah negeri yang subur dengan lahan pertanian yang luas. Bahkan hampir semua



Biasanya yang diberikan kepada fakir miskin lebih banyak kepada kesadaran diri, apalagi dengan melihat kemiskinan di Indonesia yang lebih banyak disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat akan potensi diri mereka sendiri.

wilayahnya memiliki hutan yang potensial seperti di Sumatera, Irian, Sulawesi dan lain sebagainya. Indonesia juga memiliki potensi tambang. Dari penjelasan tersebut maka jika saja pemerintah dapat lebih baik mengurus sumber daya alam ini dengan mengeluarkan kebijakan yang adil dan merata bagi seluruh warga negaranya maka Indonesia pasti akan lebih baik. Mengenai jumlah penduduk Indonesia yang banyak menjadi salah satu faktor tingginya angka kemiskinan di Indonesia, sebab di Singapura atau Belanda pun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi pula, namun kenyataannya penduduknya dapat sejahtera. Dilihat dari sumber daya alamnya, sesungguhnya Indonesia dapat menghidupi

lima kali lipat dari jumlah penduduk yang ada sekarang ini. Artinya di sini adalah masalah pemerataan yang menjadi masalah penting karena kemiskinan yang terjadi lebih banyak karena tidak meratanya pembagian kekayaan di negeri ini.

Bisa diberikan contoh yang lain?

Misalnya masalah di Kalimantan. Jika pada masa penjajahan Belanda masyarakat dapat keluar-masuk hutan secara bebas, tetapi sekarang ini masyarakat yang memasuki hutan tanpa izin ditangkap. Setelah ada konsesi hutan, akhirnya kini hutan hanya dapat diakses beberapa gelintir orang saja, tidak ada lagi masyarakat yang mencari damar dari hutan, atau sekedar memetik rotan untuk kebutuhan rumah. Tidak ada lagi orang-orang Dayak di hutan sehingga masyarakat Kalimantan kehilangan hak yang dulu pernah dimilikinya. Pun akan berdampak pula kepada para perempuan di Kalimantan yang tidak dapat lagi mendapatkan kayu dengan tanpa biaya untuk memasak di dapur.

Bagaimana konsep Islam mengatasi masalah kemiskinan?

Saya melihat umat Islam di Indonesia memeluk Islam hanya sebatas keyakinan dan dalam bentuk seremonial. Ibadah yang dilaksanakan umat Islam di Indonesia masih sering dalam bentuk formal saja. Dapat dilihat misalnya ketika sebagian masyarakat Islam menjalankan ibadah sholat, akan tetapi sebagian dari mereka juga tetap melakukan korupsi, kekerasan, perkosaan, pencurian dll. Padahal seharusnya orang yang mendirikan sholat akan dijauhkan dari perbuatan keji (*Innash sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar*). Berapa banyak misalnya bapak yang beragama Islam tetapi tetap melakukan kekerasan kepada istrinya karena himpitan ekonomi. Adapula seorang bapak yang menjual anak perempuannya kepada mucikari untuk menutupi kebutuhan hidup keluarganya.

Bagaimana organisasi perempuan Islam melihat masalah kemiskinan?

Keberadaan organisasi perempuan Islam di Indonesia pada awalnya lebih banyak ditujukan untuk menunjukkan peran perempuan, yaitu peran yang selama ini tak terlihat disebabkan karena adanya adat, dll. Misalnya saja bila dulu perempuan berusia 9 tahun sudah dipingit dan tidak boleh sekolah lagi, maka salah satu tujuan didirikannya organisasi

Menurut saya sesungguhnya kemiskinan di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh kemiskinan struktural. Jika dibandingkan dengan negara yang lain di Asia, sebenarnya Indonesia tidak pantas dikatakan negara miskin.

perempuan Islam adalah untuk merespon hal tersebut. Dengan adanya organisasi tersebut maka perempuan diharapkan dapat memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Pada akhirnya memang keberadaan organisasi perempuan Islam seperti Aisyiyah dan Muslimat menjadi jawaban bagi persoalan kemiskinan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakannya. Keberadaan organisasi perempuan pada akhirnya berkembang bukan hanya untuk eksistensi dirinya tetapi sebagai tanggung jawab kepada masyarakat yang ada di sekitarnya sehingga perempuan dapat keluar dari kemiskinan dan kebodohan.

Bagaimana kaitan peningkatan pendidikan dengan penanggulangan kemiskinan bagi perempuan?

Saya berfikir bahwa dengan mengeluarkan perempuan dari jurang kebodohan. Berarti membawa mereka keluar dari satu peluang menjadi miskin. Miskin bagi perempuan bukan hanya miskin secara materi akan tetapi miskin informasi. Dengan diberikan informasi dan pendidikan sebanyak-banyaknya, kemungkinan mereka bergantung kepada laki-laki akan berkurang. Dari situ pula para perempuan dapat mengelola kemampuannya untuk bertahan hidup. Misalnya ada seorang suami yang memiliki gaji hanya Rp 100.000,- dan mengatakan kepada istri "gaji ini harus cukup untuk sebulan". Padahal dengan gaji sebesar itu belum tentu cukup, maka dengan ketrampilan, akses dan informasi yang dimilikinya maka istrinya akan mampu mengolah seratus ribu tersebut untuk mencukupi kebutuhan sebulan.



Bagaimana dengan masalah perempuan pekerja seks komersil ?

Yang terpenting bagi saya adalah memberikan informasi sebanyak-banyaknya buat perempuan. Semakin banyak informasi yang dimiliki maka perempuan akan semakin dapat memetakan dirinya dan menempatkan dirinya dengan baik. Perempuan dapat menentukan pilihan yang baik dan pilihan yang buruk untuk bertahan hidup. Bagi para perempuan pekerja seks yang terpenting adalah memberikan informasi tentang bagaimana mereka dapat menolong diri mereka sendiri. Diberikan pula informasi berbagai resiko pekerja seks dengan harapan perempuan mampu memilih kepada pilihan yang tidak merugikan. Saya pernah bertemu dengan seorang anak perempuan yang kemudian menjadi pelacur, anak tersebut pernah menjadi juara dalam *Musabaqoh Tilawatil Qur'an* (sering disingkat dengan MTQ yang berarti lomba membaca al-Qur'an). Dari situ saya kemudian berfikir bahwa anak perempuan tersebut tidak pernah mendapatkan informasi yang lengkap mengenai bagaimana kerasnya hidup sebagai pekerja seks dibanding kerasnya berjuang menjadi juara MTQ.

Bagaimana dengan kasus trafficking?

Salah satu penyebab maraknya kasus *trafficking* menurut saya adalah karena kemajuan informasi televisi hingga ke desa-desa. Dari televisi lah gam-

baran mengenai kehidupan disosialisasi baik melalui iklan maupun film. Gambaran tersebut melahirkan obsesi dari perempuan desa untuk juga mengalami hidup seperti demikian hingga mereka berfikir bahwa dengan bekerja di luar negeri impian mereka akan menjadi nyata. Seperti yang terjadi di Garut misalnya, tidak ada lagi anak-anak perempuan Garut yang memilih untuk bekerja di sawah karena dianggapnya bukan sebagai pekerjaan perempuan lagi. Di samping pekerjaan di sawah akan merusak kecantikannya.

Penyebab lainnya?

Saya kira adanya perempuan yang sukses pulang kampung dari Serawak/Malaysia atau negeri lainnya. Misalnya para perempuan tadi memakai emas dan membawa uang yang banyak lalu membangun rumah mereka dengan segala macam perabot mahal. Contoh seperti ini tentu dapat membangkitkan keinginan bagi sebagian perempuan lain untuk kerja ke luar negeri.

Bagaimana dengan keberadaan penyalur tenaga kerja ilegal ?

Saya kira sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadi penyebab yang besar juga. Banyak orang yang mengambil jalan pintas mencari uang dengan mendirikan penyalur tenaga kerja dengan tujuan menipu, didukung dengan impian para calon tenaga kerja yang juga ingin secara cepat mendapatkan gaji banyak yaitu dengan menjadi tenaga kerja di luar negeri.

Salah satu penyebab maraknya kasus *Trafficking* menurut saya adalah karena kemajuan informasi televisi hingga ke desa-desa. Dari televisi lah gambaran mengenai kehidupan disosialisasi baik melalui iklan maupun film.

Bagaimana jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai negara pertanian (agraris)?

Pemerintah Indonesia seringkali mengorbankan petani dengan rendahnya harga beras dan gabah misalnya. Akibatnya para petani dan perempuan petani lebih banyak memilih untuk mencari kerja di kota dengan gaji yang lebih banyak. Jika pemerintah dapat menekan perpindahan penduduk desa ke kota dengan subsidi pupuk dan sebagainya di desa, mungkin tingkat perpindahan tenaga kerja di kota dan di luar negeri pun dapat menurun. Dengan subsidi diharapkan para petani dan perempuan petani tidak merasa malas untuk menanam padi karena harapan keuntungan yang menjanjikan. Pemerintah pun tidak perlu mengimpor beras dari negara tetangga. Perbaikan di desa akan juga menekan jumlah pencari kerja keluar negeri. Gemerlapnya kehidupan kota juga membuat penduduk desa merasa bangga jika mereka memiliki barang-barang elektronik seperti kulkas, TV, dll. Kasus yang terjadi di Cianjur adalah kebanyakan dari para tenaga kerja wanita lah yang telah mampu melengkapi rumah mereka dengan barang-barang mewah tadi.

Bagaimana dengan pengalaman Ibu sendiri membantu kasus trafficking?

Kami pernah mengadakan sebuah acara untuk mendirikan *women crisis centre* (WCC) di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung dan di Nusa Tenggara. Kami berkesimpulan bahwa terjadinya *trafficking* karena ketidaktahuan perempuan dan anak

sehingga mereka menjadi korban penipuan. Kami juga melakukan sosialisasi mengenai masalah perdagangan perempuan ini melalui pengajian-pengajian sehingga ibu-ibu di pengajian dapat menjelaskan kepada masyarakat luas, terutama untuk bersikap hati-hati terhadap calo-calo pencari tenaga kerja. Para calo biasanya datang ke kampung-kampung, menjadikan para perempuan desa sebagai pacar hingga mengawini mereka dengan membayar mahar. Biasanya dengan cara seperti itulah para orang tua pada akhirnya merasa tidak ada alasan lagi untuk melarang para calo yang telah menjadi suami anak perempuan mereka itu pergi dari kampung. Dengan mengantongi izin dari orang tua itu pula para calo kemudian membawa para perempuan desa tadi ke mucikari-mucikari di kota. Kasus seperti tersebut banyak terjadi baik dari sekitar Cianjur hingga di Batam.

Apa saran ibu untuk perempuan Indonesia di masa depan? terutama berkaitan dengan perempuan sebagai korban kemiskinan?

Perempuan harus berpendidikan tinggi agar tidak memiliki ketergantungan yang tinggi kepada laki-laki dan masyarakat luas. Dengan berpendidikan tinggi pula perempuan dapat melakukan wira usaha untuk menunjang ekonominya sendiri. Dengan pendidikan tinggi juga jika perempuan harus bekerja di luar negeri pun tidak hanya sebagai pembantu rumah tangga, akan tetapi menjadi pekerja profesional dengan gaji standar. ❁

Kamus Istilah

Buruh Migran	: Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar Negeri
Illegal	: Tidak sah, tidak laku
Kolektif	: Dilakukan secara bersama-sama dengan sistem saling bekerjasama
Trafficking	: Penjualan anak dan perempuan ke luar negeri
Pentasarufan	: Pengembalian, penyerahan
Reduksi	: Pengurangan, pemotongan
Eksistensi	: Keberadaan
Apresiasi	: Penghargaan



Kemiskinan dan Perempuan

Oleh: KH. Hussein Muhammad

Ibnu Jarir al Thabari mengatakan bahwa faqir adalah orang yang sangat membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ia dapat menahan diri dari minta-minta, sementara orang miskin adalah orang yang membutuhkan tetapi ia minta-minta. (Tafsir, jilid XIV/308-309)

Kemiskinan dan Perempuan

Kata miskin berasal dari kosakata Arab. Dalam al Qur'an kata ini berikut derivasinya disebut sebanyak 69 kali, 23 di antaranya bermakna kemiskinan. Secara literal Al Raghīb al Ishfahani mengartikan miskin sebagai "sesuatu yang tetap, tidak bergerak". Ini memberikan arti bahwa seorang yang miskin adalah orang yang tidak mampu melakukan apa-apa, tidak bisa bergerak dan tidak berdaya. Ia tidak bergerak, bisa karena kemalasannya, atau karena tidak ada peluang untuk bergerak atau karena ada faktor lain yang membuatnya tidak bisa bergerak. Sementara miskin dalam pengertian sehari-hari adalah "man la yajid ma yakfihi" (orang yang tidak dapat memperoleh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya).

Dalam percakapan sehari-hari kita, kata miskin sering digandengkan dengan kata *faqir* (fakir miskin). Kedua kata ini secara substantif memiliki arti yang sama, tetapi ia berbeda pada sisi kwalifikasinya. Ibnu Jarir al Thabari mengatakan bahwa faqir adalah orang yang sangat membutuhkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi ia dapat menahan diri dari minta-minta, sementara orang miskin adalah orang yang membutuhkan tetapi ia minta-minta. (Tafsir, jilid XIV/308-309). Ini menunjukkan kemiskinan memiliki kwalifikasi lebih berat daripada faqir. Pandangan lain memberikan arti sebaliknya faqir lebih berat dari miskin.

Terlepas dari perbedaan makna fakir dan miskin di atas, kemiskinan hari ini mungkin menjadi kosa kata yang paling banyak dirasakan tetapi sedikit dibicarakan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Pembicaraan paling emosional, paling bersemangat dan paling getol diperjuangkan adalah tema-tema yang berkaitan dengan isu keyakinan dan moral personal, seperti liberalisme, sekularisme, pelacuran, perjudian, dan sejenisnya. Sementara kemiskinan yang menjadi penyebab kematian berjuta-juta orang tampaknya tidak atau kurang begitu menarik. Pakar kemiskinan Jeffrey Sachs mengungkapkan bahwa bumi manusia setiap tahun ditinggal mati oleh antara 8 sampai 11 juta orang akibat kemiskinan ekstrim. Ini berarti sekitar 20.000 orang mati setiap hari. Mereka tewas mengenaskan dan sia-sia karena ketidakmampuan membeli obat atau membayar biaya rumah sakit, tempat tinggal yang kumuh, busung lapar, ketidakmampuan membeli air minum, ketidakmampuan bersekolah atau melanjutkan sekolah dan seterusnya. Fakta ini menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu ancaman terbesar abad ini.

"Al faqr huwa al maut al Akbar", kefakiran adalah kematian besar, kata pepatah Arab. Sementara ada riwayat lain mengatakan: "kaada al faqr an yakuna kufra", kefakiran/kemiskinan dapat mengantarkan dan menjebak yang bersangkutan pada situasi dan perangkap kekufuran. Kekufuran berarti pengingkaran

terhadap hal-hal yang sebelumnya dinyatakan sebagai kebaikan yang harus dijaga. Kekufuran berarti pengingkaran terhadap nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi oleh agama dan oleh suatu masyarakat. Dengan kata lain seseorang yang dilanda kemiskinan memiliki potensi yang kuat dan besar untuk melakukan tindakan-tindakan kejahatan atau kriminalitas atau asusila dalam berbagai bentuknya. Kekuatan moral personal seringkali runtuh menghadapi sakitnya penderitaan akibat kemiskinan. Orang sering mengatakan "Tuntutan perut tidak bisa ditunda", tidak seperti yang lainnya. Realitas manusia Indonesia yang beragama dengan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai prinsip utama memperlihatkan dengan jelas betapa moralitas keagamaan terkikis dan terdistorsi sedemikian besar. Korupsi yang merajalela di mana-mana menjadi indikasi lain dari kemiskinan di samping disebabkan oleh kerakusan. Kejahatan demi kejahatan dan dengan beragam bentuk telah menjadi fenomena sehari-hari di banyak tempat. Kemiskinan ternyata telah menimbulkan kompleksitas kerusakan sosial dan kesusilaan.

Al Qur'an dan Kemiskinan

Al Qur'an sebagai sumber utama dan pedoman kehidupan manusia dan masyarakat muslim sesungguhnya telah memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap problem kemiskinan ini. Banyak sekali ayat yang menegaskan keharusan umat manusia untuk menghapuskan kemiskinan melalui beragam cara yang mungkin di satu sisi dan mengharuskan mereka melakukan pemihakan kepada orang-orang miskin juga dengan beragam jalan yang baik pada sisi yang lain. Sejumlah ayat al Qur'an misalnya memerintahkan manusia untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. "Jika shalat telah ditunaikan, maka pergilah ke mana saja untuk mencari anugerah Tuhan (guna memenuhi kebutuhan hidupnya) dan selalu mengingat Tuhan". (Q.S. *al Jum'ah*), "Carilah anugerah Allah untuk bekal kebahagiaanmu di akhirat dan jangan melupakan bagianmu untuk kenikmatan duniamu dan berbuat baiklah kepada siapa saja sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu" (Q.S. *al Qashash*, 28:77). Sementara pada ayat yang lain al Qur'an mengancam keras orang-orang yang tidak menaruh kepedulian kepada orang-orang miskin. Tuhan menyatakannya sebagai orang yang mendustakan agama". (Q.S. *al Ma'un*). Terhadap mereka yang menumpuk-numpuk kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak disalurkan untuk kepentingan sosial,



Al Qur'an mengancamnya dengan siksaan yang berat di akhirat kelak. (Q.s. *al Taubah*, 34). Kepada masyarakat al Qur'an juga mewajibkan membayar zakat. Zakat merupakan sumber keuangan negara yang harus dikeluarkan dan diserahkan untuk kesejahteraan sosial. Dan kepada pemerintah al Qur'an mewajibkan agar menjamin kebutuhan-kebutuhan pokok warganya melalui zakat/pajak atau dana lain yang dihimpunnya dari orang-orang yang mampu. Para penafsir al Qur'an ayat 60 surah al Taubah, sepakat bahwa prioritas pembagian zakat harus diberikan kepada fakir miskin. Selain zakat, Islam juga menganjurkan masyarakat untuk bersedekah sebagai cara mengatasi kemiskinan masyarakat.

Demikianlah, kita melihat bahwa al Qur'an telah memberikan cara-cara, jalan dan pandangan tentang problema kemiskinan yang memungkinkan masyarakat mampu menghapuskan kemiskinan dan menyangi orang-orang yang dihipit derita kemiskinan.

Perempuan dan Kemiskinan

Kemiskinan dapat menimpa dan diderita oleh siapa saja, manusia laki-laki dan perempuan. Tetapi realitas kemiskinan yang tengah melanda bangsa Indonesia, memperlihatkan bahwa korban kemiskinan paling banyak diderita orang-orang yang lemah atau yang dilemahkan. Mereka adalah kaum perempuan

dan anak-anak. Keadaan ini terjadi karena struktur sosial masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik dan sekaligus mendudukan mereka sebagai warga kelas dua (subordinat) Dalam struktur sosial yang seperti ini, perempuan akan selalu tergantung kepada laki-laki (suami). Keadaan ini pada gilirannya mereka lalu dipandang rendah, dimarginalkan dan didiskriminasi dalam berbagai ruang kehidupannya terutama dalam akses ekonomi dan pendidikan. Struktur sosial patriarkhis selalu menciptakan kemiskinan dan kebodohan perempuan jauh lebih besar dibandingkan kaum laki-laki. Hidup mati perempuan dalam konteks masyarakat patriarkhis sangat tergantung pada laki-laki. Sepanjang struktur sosial ini masih terus dilang-gungkan, kemiskinan perempuan adalah sesuatu yang niscaya.

Dalam konteks Indonesia yang tengah terpuruk dan dilanda kemiskinan yang cukup massif seperti hari ini, kita melihat dengan jelas bagaimana kemiskinan telah melanda ribuan bahkan jutaan perempuan. Ketika laki-laki atau suami miskin, atau menjadi miskin, karena ketiadaan pekerjaan atau di PHK, maka kaum perempuan paling banyak menderita daripada kaum laki-laki. Namun demikian realitas juga menunjukkan kaum perempuan seringkali memiliki daya tahan tubuh dan mental yang lebih kuat dari kaum laki-laki. Kecintaan perempuan pada kehidupan anak-anaknya dan keluarganya mendorong mereka untuk bekerja keras. Mereka harus bekerja ganda. Fungsi pemberi nafkah keluarga yang selama ini diyakini menjadi kewajiban laki-laki, kini mengalami perubahan. Semakin hari semakin banyak kaum perempuan menggantikan fungsi tersebut. Ketidakberdayaan laki-laki (suami/ayah) menjamin kehidupan keluarganya telah memaksa perempuan (isteri/ibu) bekerja di luar rumah. Kita melihat dengan nyata pasar-pasar tradisional, buruh-buruh pabrik dan di sawah-sawah tampak sekali kaum perempuan jauh lebih banyak dari kaum laki-laki, dan ini semakin hari semakin membengkak jumlahnya. Kaum perempuan menerima kenyataan hidup yang pahit ini bukan hanya demi kebutuhan dirinya, tetapi juga keluarganya, anak-anaknya dan bahkan suaminya sendiri.

TKW dan *Trafficking* : Korban Kemiskinan

Pada perkembangan terakhir, problem kemiskinan yang menghimpit perempuan pada sisi lain telah memaksa (sebagian juga dipaksa) mereka mencari sumber-sumber ekonomi dengan berbagai

cara dan di manapun, bahkan meski seringkali tanpa mempertimbangkan lagi nilai-nilai agama maupun budaya yang dianutnya. Fenomena tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang kebanyakan perempuan menunjukkan kenyataan yang tidak bisa dibendung oleh kebijakan apapun, termasuk ketentuan pandangan agama konvensional yang melarang mereka ke luar rumah tanpa *mahram*. Para TKW tersebut menjalani pekerjaannya dengan mempertaruhkan risiko yang memungkinkan mereka direndahkan dan diperlakukan dengan kekerasan, bahkan tidak jarang menemui kematian. Kasus lain adalah perdagangan perempuan (*trafficking in women*). Isu ini telah muncul sebagai fenomena yang terus berkembang. Indonesia termasuk negara dengan jumlah kasus *trafficking* yang besar di dunia. Fenomena ini berlangsung bukan hanya di dalam negeri tetapi juga melintas batas geografis negara. Kajian-kajian ilmiah tentang perdagangan perempuan dan anak menyebutkan bahwa ada sejumlah faktor mengapa perempuan menjadi korban *trafficking*. Beberapa di antaranya adalah faktor kemiskinan yang akut. Ini adalah yang paling banyak dijumpai. Selain itu adalah faktor pendidikan yang rendah, perkawinan di bawah umur, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, sempitnya lapangan kerja, pengangguran dan sebagainya. Faktor-faktor ini telah mendorong dan menggerakkan banyak perempuan terperangkap dalam kerja-kerja yang bukan menjadi pilihannya. Sebagian mereka terpaksa menerima menjadi pelacur atau Pekerja Seks Komersial (PSK). Sejumlah penelitian lapangan menemukan kenyataan bahwa

Kajian-kajian ilmiah tentang perdagangan perempuan dan anak menyebutkan bahwa ada sejumlah faktor mengapa perempuan menjadi korban *trafficking*. Beberapa di antaranya adalah faktor kemiskinan yang akut.

Kasus perdagangan perempuan sesungguhnya pernah diungkap oleh Al Quran melalui kasus perbudakan perempuan.

pekerjaan sebagai PSK mereka lakukan antara lain dan yang paling banyak juga lantaran faktor ekonomi. Banyak di antara mereka adalah ibu-ibu rumah tangga. Mereka terpaksa melakukan “pekerjaan” itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, untuk makan, sekolah dan untuk berobat. Sebagian lagi karena kekerasan di dalam rumah tangga (perceraian, tidak diberi nafkah dan lain-lain). Posisi gender mereka yang direndahkan mengakibatkan mereka tidak berdaya dan mudah terperangkap dan dieksploitasi secara seksual untuk kepentingan ekonomi pihak lain yang lebih kuat.

Kasus perdagangan perempuan sesungguhnya pernah diungkap oleh Al Qur'an melalui kasus perbudakan perempuan. Dalam sebuah ayat al Qur'an menyatakan “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu untuk melakukan pelacuran padahal mereka menginginkan kesucian (tidak menghendaknya) karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa”.(Q.S. *al Nur*, 24:33).

Ayat di atas menegaskan paling tidak empat hal. Pertama, kewajiban melindungi mereka yang lemah atau dilemahkan. Dan seperti yang sudah dikemukakan, orang-orang yang dilemahkan pada umumnya adalah kaum perempuan dan anak-anak. Kedua, kewajiban memberi ruang kebebasan atau kemerdekaan

kepada orang-orang yang terperangkap dalam praktik perbudakan. Ketiga, kewajiban menyerahkan hak-hak ekonomi mereka. Keempat, haramnya mengeksploitasi integritas tubuh perempuan untuk kepentingan-kepentingan duniawi (ekonomi, kekuasaan, kebanggaan diri).

Demikianlah, kita melihat dengan sangat jelas bahwa faktor utama yang menyebabkan banyak perempuan menjadi korban *trafficking* dan kejahatan kesusilaan lainnya, sebagaimana sudah dikemukakan, adalah faktor kemiskinan dan pendidikan perempuan yang rendah. Maka cara yang harus dilakukan adalah dengan menghapuskan kemiskinan itu sendiri, menyediakan pendidikan, membuka lapangan kerja bagi mereka dan seterusnya. Tugas ini tentu saja pertama-tama harus menjadi komitmen negara. Pemerintah baik di pusat maupun di daerah melalui berbagai institusi yang ada di dalamnya perlu menjalin aliansi strategis untuk membangun komitmen bersama bagi upaya menangani sumber atau akar masalah *trafficking* tersebut. Ini berarti bahwa pemerintah harus dapat memastikan kesempatan dan hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Upah pekerjaan perempuan harus dihargai sama dengan upah laki-laki. Pemerintah baik di pusat maupun daerah juga perlu membangun jaringan kerjasama secara sinergis dengan lembaga-lembaga masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama dalam upayanya mencegah, menanggulangi dan menghapuskan praktik-praktik yang merugikan dan yang membuat derita serta memiskinkan perempuan, apapun bentuknya.

Cara lain yang lebih strategis meskipun mungkin membutuhkan waktu yang sangat panjang adalah menciptakan ruang budaya setara dan adil gender. Perempuan harus dipandang sebagai makhluk Tuhan yang sama dan setara dengan laki-laki dari sisi gender berikut seluruh hak dan kewajibannya. Perempuan harus diperlakukan secara terhormat dan dihargai, sama seperti terhadap laki-laki. Mereka tidak boleh direndahkan apalagi dieksploitasi dalam bentuk dan untuk kepentingan yang melanggar hak-hak dasar dan moral kemanusiaan. Dan semua orang tidak boleh membiarkan perempuan berada dalam keadaan tidak memperoleh akses pendidikan, pekerjaan dan kesehatan reproduksinya. Membiarkan kebodohan, kemiskinan dan kesakitan perempuan sama artinya dengan mempersiapkan generasi yang bodoh dan miskin. ❁



Kemiskinan Perempuan; Antara Pilihan Takdir dan Takdir yang Dipilihkan

Oleh: Ustadz Faqihuddin Abdul Kodir, MA

Kemiskinan yang ada pada diri Nabi SAW, dan beberapa ulama tertentu, adalah kemiskinan yang digeluti secara sadar, penuh keimanan dan penuh pengertian. Kemiskinan yang justru melatih seseorang untuk bisa merasakan solidaritas kemanusiaan dan meningkatkan rasa ketergantungan terhadap Allah SWT.

wafatpun di dalam rumah tidak ada makanan yang bisa dimakan, kecuali gandum dalam jumlah sedikit yang tidak cukup untuk satu orangpun (2803). Hampir sering dalam satu bulan keluarga Rasulullah SAW tidak menyalakan api dapur, karena yang dimakan hanya kurma dan air (2793). Selama hidup, Nabi SAW tidak pernah menemui makanan yang mengenyangkan dalam dua hari berturut-turut. Makanan yang dimiliki dalam kehidupan Rasulullah SAW, hanyalah gandum, kurma, minyak zaitun dan air. Itupun tidak ditemui setiap hari. Dan dalam satu hari, lebih sering hanya menemui makanan satu kali, jarang dua kali, apalagi tiga kali. Bahkan ketika wafatpun, baju besi Rasulullah SAW masih tergadaikan pada tetangganya yang Yahudi, karena berhutang gandum untuk menghidupi keluarga. (lihat teks-teks hadits mengenai kondisi kemiskinan Nabi Saw dan para Sahabat ra, dalam kitab *Jam'i al-Ushul*, juz V, hal. 380-393, no. Hadits: 2793-2819).

Tetapi kemiskinan pada diri Nabi SAW, dan beberapa ulama tertentu, adalah kemiskinan yang digeluti secara sadar, penuh keimanan dan penuh pengertian. Kemiskinan yang justru melatih seseorang untuk bisa merasakan solidaritas kemanusiaan dan meningkatkan rasa ketergantungan terhadap Allah SAW. Dalam beberapa kali kesempatan, Nabi Muhammad SAW lebih memilih untuk hidup miskin daripada harus bergelimpang dengan kekayaan. Sekalipun kekayaan itu sudah ada di depan mata, terutama pada saat-saat ada rampasan peperangan yang melimpah ruah. Nabi SAW-pun pernah ditawarkan Malaikat Jibril as untuk hidup kaya seperti raja-raja, tetapi Nabi SAW menolak dan memilih untuk menjadi manusia biasa, bukan raja yang kaya raya.

Karena itu, kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW selalu berdo'a: "*Allahumma ahyinî miskînan wa amitnî miskînan wahsyurnî ma'a zumratil masâkin yawm al-qiyâmah*". Ya Allah, hiduppkanlah aku dalam kemiskinan, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku kelak di hari akhir

Problem kemiskinan adalah problem sosial yang akan selalu hadir dalam kehidupan manusia. Terkadang ia dianggap memalukan seseorang sehingga merasa harus menjauh dan tidak mengakuinya. Tetapi tidak sedikit juga orang-orang yang justru menjadikan kemiskinan sebagai media untuk memperoleh dana bantuan atau mengemasnya untuk proyek-proyek sosial. Dalam Islam kemiskinan atau kefakiran bukanlah suatu aib yang merendahkan derajat seseorang. Karena tinggi rendah seseorang dalam Islam, tidak ditentukan dengan kadar kaya atau miskin. Tetapi sejauhmana ia memiliki kiprah ketakwaan, baik dalam kondisi kaya atau miskin. *Inna akramakum 'indallâhi atqâkum*.

Di dalam sejarah awal Islam tidak sedikit dari para ulama, tabi'in, sahabat, bahkan Nabi Muhammad SAW yang hidup dalam kondisi papa dan miskin. Aisyah ra, isteri baginda Nabi SAW ini pernah menceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW

dengan golongan orang-orang miskin. Ini doa yang sering diucapkan Nabi SAW. (Riwayat sahabat Anas bin Malik ra, lihat *Jâmi' al-Ushul*, juz V, hal. 373, no. Hadits: 2774). Jika kemiskinan menjadi suatu pilihan sadar, tentu saja ia bukanlah kemiskinan yang merendahkan diri seseorang, menghinakan, menelantarkan atau mengkerdulkan. Bukan kemiskinan yang membuat seseorang harus terlunta-lunta untuk meminta-minta dari satu orang ke orang yang lain. Inilah pilihan terhadap kemiskinan dengan penuh keimanan dan kesadaran untuk spiritualitas dan kemanusiaan.

Berbeda ketika kemiskinan itu menjadi takdir struktural, yang dibentuk sistim sosial dan diterapkan kepada anggota masyarakat, yang kemudian menghinakan orang, merendahkan, melecehkan dan menyeret banyak pihak untuk hidup dalam kenistaan sosial. Kemiskinan seperti ini justru yang dilawan Nabi SAW. Kemiskinan yang seperti ini, yang dalam do'a Nabi SAW, disebut sebagai kefaqiran. Dalam banyak teks hadits, Nabi Muhammad Saw dalam setiap shalat berdoa: "*Allâhumma innî a'ûdzu bika min al-kufri wa al-faqri wa adzâb al-qabri*". Ya Allah, aku berlindung dengan diri-Mu dari kekafiran, kefakiran dan azab kubur. (lihat *Jâmi' al-Ushul*, juz V, hal. 54-55, no. Hadits: 2208). Kekafiran, hampir disamakan dengan kefakiran, begitu juga azab kubur disejajarkan dengan kafakiran. Betapa bahwa kemiskinan itu akan menyebabkan seseorang dekat dengan kekufuran dan tindakan-tindakan dosa yang akan diazab kelak di alam kubur. Ini adalah kemiskinan yang merendahkan martabat sosial seseorang, yang dibentuk struktur sosial untuk merendahkan dan menjauhkan mereka dari sentra-sentra keputusan, kebijakan dan sumber daya. Kemiskinan yang seperti ini yang dilawan Nabi SAW. Kemiskinan yang seperti ini, dalam salah satu ungkapan disebut sebagai sesuatu yang dekat dengan kekafiran. "*Kâda al-faqru an yakûna kufuran*". Kemiskinan struktural itu, hampir sama dengan kekafiran.

Perempuan dan Kemiskinan Struktural

Kemiskinan yang dialami banyak orang saat ini adalah kemiskinan struktural, yang terjadi akibat ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah yang sejak awal tidak bersahabat dengan warga yang miskin. Dalam ketimpangan relasi sosial, yang selalu menjadi korban paling berat adalah perempuan. Tetapi hal ini, seringkali tidak menjadi kesadaran publik, terutama para pengambil kebijakan untuk memberdayakan dan mementingkan perempuan. Pada konteks pembagian dana subsidi BBM untuk warga miskin, ketika yang ditunjuk adalah kepala keluarga yang harus laki-laki, yang terjadi tidak sedikit dari mereka yang membelanjakan uang yang diterima, justru untuk berjudi, minum-minum dan merokok, atau bahkan untuk beristri lagi atau untuk mencari perempuan. Berbeda dengan kebanyakan perempuan miskin yang memiliki tanggung jawab besar, untuk kembali dan menghidupi keluarga.

Dalam kondisi kemiskinan struktural ini, Nabi SAW justru menyarankan umat Islam bekerja semampu dan sebanyak mungkin. Anjuran bekerja dalam Islam, adalah untuk kecukupan diri, kemandirian dan terhindar dari kemiskinan dan perilaku meminta-minta. Dalam suatu teks hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak ada makanan yang dikonsumsi oleh seseorang, yang lebih baik dari hasil jerih pekerjaan tangannya sendiri, sesungguhnya Nabi Dawud as selalu memakan dari hasil pekerjaan tangannya sendiri". (Jami' al-Ushul,



www.pikiranrakyat.com

XI/224, no. hadits: 8108). Dalam hadits lain, “Sungguh, demi Dzat yang menguasai diriku, seseorang yang menggunakan seutas tali, mencari kayu bakar dan mengikatkan ke punggungnya, (lalu menjualnya ke pasar) adalah lebih baik baginya daripada harus meminta-minta kepada orang lain, yang kadang diberi dan terkadang ditolak”. (Bukhari, no. hadits 1470).

Ada beberapa hal yang bisa dipahami dari kedua teks hadits ini. Di antaranya, bahwa kecukupan ekonomi menjadi nilai tambah sendiri dalam pandangan Nabi SAW. Pada prakteknya, dalam tataran sosial kecukupan ekonomi juga menjadi kekuatan posisi tawar tersendiri untuk bisa memperoleh akses terhadap sumber-sumber sosial, politik dan ekonomi yang lain. Pengalaman perempuan menjadi sangat nyata dalam hal ini. Baik di dalam rumah tangga maupun dalam dunia publik, posisi tawar mereka sangat lemah karena tidak memiliki kecukupan diri terhadap kebutuhan ekonomi mereka. Dari ketidakcukupan ini, kemudian terbangunlah stereotip yang lain terhadap perempuan. Bahwa mereka seharusnya di rumah saja, tidak perlu bekerja, tidak perlu memiliki harta dan tidak perlu memperoleh gaji tambahan untuk keluarga karena dia tidak ada kewajiban memberikan nafkah.

Untuk merubah stereotip ini, salah satunya adalah perempuan harus memiliki kecukupan diri dan tidak ada ketergantungan ekonomi terhadap siapapun. Ketika kecukupan ini sudah diperoleh, perempuan akan memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dalam melakukan tawar menawar dengan siapapun yang ia hadapi. Tetapi prakteknya, perempuan mengalami kendala tersendiri ketika berupaya melakukan pencukupan diri. Kendala itu yang seringkali menghadang dan datang dari luar diri perempuan itu sendiri, sehingga ia kesulitan melakukan upaya kecukupan diri. Jika bisa dilakukanpun, yang terjadi seringkali ia menjadi korban kekerasan dalam dunia kerja yang digeluti.

Kepada individu, baik laki-laki maupun perempuan, kedua teks hadits tersebut menganjurkan untuk melakukan pencukupan diri. Ketika ini sulit dilakukan, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk membuka kesempatan bagi mereka agar bisa melakukan upaya pencukupan diri. Karena hanya dengan kecukupan diri itu, seseorang setidaknya bisa terhindar dari kenistaan dan kesewenang-wenangan orang lain.

Salah satu ajaran Islam yang menjadi media untuk memberantas kemiskinan struktural adalah syari’at zakat. Secara teologis, zakat merupakan institusi keuangan yang diharapkan bisa berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan sumber-sumber ekonomi.

Memprioritaskan Penguatan Perempuan

Salah satu ajaran Islam yang menjadi media untuk memberantas kemiskinan struktural adalah syari’at zakat. Secara teologis, zakat merupakan institusi keuangan yang diharapkan bisa berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi umat, terutama yang berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan sumber-sumber ekonomi. Zakat adalah media ekonomi keadilan dan kerakyatan, yang dapat menempatkan sumber-sumber ekonomi pada tempat yang semestinya, sehingga secara kreatif akan sanggup menumbuhkan daya produktifitas anggota masyarakat dalam mencari dan mengembangkan pendapatan mereka. Pada waktu yang sama, ia dapat menjadi media penguatan masyarakat yang dengan efektif bisa mengangkat derajat kelompok masyarakat yang lemah [*al-mustadh’afin*], sehingga mereka memiliki kapasitas, potensi dan kesempatan yang sama dengan kelompok yang telah lebih kuat, untuk memakmurkan kehidupan ini dan mengelola sumber-sumber daya alam. Dalam surat al-Hasyr disebutkan bahwa salah satu tujuan distribusi kekayaan dalam Islam adalah agar harta benda itu berputar dari satu tangan ke tangan yang lain, dan tidak hanya berada pada tangan orang-orang kaya semata (Lihat: QS. Al-Hasyr, 59:7).

Menurut Imam Mâlik bin Anas (w. 179H/795M) bahwa dana zakat harus diberikan kepada yang paling miskin, membutuhkan dan berjumlah lebih banyak dari *ashnaf* yang lain (Lihat: al-Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah*, juz II, hal. 688-689). Dalam bahasa Ibn al-Atsir (w. 606H) ketika memberi judul terhadap teks-teks hadits pembagian zakat, bahwa dana zakat harus diberikan kepada paling miskin dan paling dekat kerabat [*al-alzam wa al-aqarib*]. (Lihat: Ibn al-Atsir, *Jâmi' al-Ushûl*, juz VII, hal. 301.). Dalam struktur sosial kita sekarang, kelompok yang paling lemah, miskin, terpinggirkan dan rentan terhadap segala bentuk kekerasan adalah kelompok perempuan. Sebagai ilustrasi kecil adalah perempuan korban perkosaan, biasanya masyarakat akan memandang miring. Ia akan menerima cemoohan sebagai penggoda, dandanannya terbuka, tingkahnya menggiurkan, atau paling tidak masyarakat hanya sebatas kasihan, tetapi status sosialnya tetap menjadi rendah, nista dan mengenaskan. Apalagi kalau sampai hamil dan melahirkan anak, kenistaannya akan bertambah. Sekalipun ia menjadi korban dan tidak bersalah, sangat sedikit sekali masyarakat yang mau peduli membantu, menolong dan mengembalikan citra dirinya. Keluarganya pun biasanya akan malu melaporkan ke pihak yang berwenang, atau mengantar dan mendampingi ke rumah sakit atau klinik untuk memulihkan kesehatannya, baik yang fisik maupun yang psikis. Orang akan merasa punya citra buruk ketika berhubungan dengan perempuan korban perkosaan. Karena itu, tidak pernah terdengar ada pengumpulan dana untuk membantu korban perkosaan. Dana zakat pun tidak akan pernah sampai ke sana, padahal jika melihat semangat zakat sebagai pengentas keterpurukan dan kenistaan, misalnya dengan melihat *ashnaf riqab*, maka perempuan korban perkosaan berhak terhadap dana tersebut. Tetapi persoalannya ada pada keengganan masyarakat untuk membantu dan mendampingi mereka.

Lebih dari itu adalah persoalan struktur sosial, yang masih timpang dalam menempatkan posisi perempuan. Ketimpangan struktur ini yang mengakibatkan keterpurukan perempuan dalam segala sektor kehidupan; ekonomi, sosial, politik dan pendidikan. Perempuan tidak memiliki daya tawar yang sama ketika memasuki dunia pekerjaan; ketika memilih jenis pekerjaan, jabatan dalam pekerjaan dan penghargaan dari pekerjaan. Selalu saja ia ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan

dihargai dengan yang lebih rendah. Misalnya yang paling nyata adalah pekerjaan pembantu rumah tangga, pasti yang akan dipilih adalah perempuan dengan segala bentuk pekerjaan yang maha berat, tetapi gaji yang akan diterima sangat kecil, bahkan lebih kecil dari pekerjaan supir, satpam, penjaga kebun atau penyiram bunga, jika dilakukan oleh laki-laki. Pada ranah lain, pendidikan, sosial dan politik juga terjadi hal yang sama, perempuan selalu memperoleh kesempatan yang lebih kecil dan penghargaan yang tidak memadai. (Untuk lebih lengkap, lihat: Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 1999: Pustaka Pelajar, Yogyakarta.).

Kondisi struktur yang timpang ini, pada prakteknya membuat banyak persoalan bahkan kekerasan terhadap perempuan, baik yang fisik maupun non-fisik. Pelecehan-pelecehan seksual terhadap perempuan lebih banyak terjadi karena persoalan daya tawarnya yang lemah dan dilemahkan. Para pelaku kekerasan biasanya, berangkat dari motivasi psikologis untuk membuktikan bahwa dirinya kuat, jantan, perkasa dan sanggup menundukkan perempuan. Di samping karena faktor hukum yang sangat lemah dalam melindungi perempuan dan kondisi sosial yang permisif dalam hal seksual. Kondisi yang timpang ini juga banyak menyulitkan perempuan. Ketika para perempuan mengamalkan amanah mereka sebagai manusia dan khalifah di bumi, mereka menjadi sangat terbatas, lemah, kurang mampu dan tidak memiliki kapasitas yang cukup. Termasuk ketika mereka harus mengamalkan amanah reproduksi, yang hanya bisa dilakukan perempuan. Mereka kekurangan gizi, pelayanan kesehatan yang tidak memadai dan perhatian yang tidak mencukupi, sehingga tidak sedikit dari mereka yang harus meninggal sia-sia karena proses reproduksi.

Persoalannya adalah pada struktur yang tidak atau belum memihak kepada perempuan. Sehingga semua kebijakan, tatanan dan aturan yang dilahirkan, tidak secara sadar memberikan kesempatan kepada perempuan dan memihak kepada perempuan. Misalnya, pada persoalan pendistribusian dana masyarakat, dalam kondisi struktur yang seperti ini, hampir bisa dipastikan semua program pengalokasian dana, baik dari pemerintah maupun masyarakat, termasuk dana zakat, sangat sedikit sekali yang secara langsung diberikan kepada perempuan. Sekalipun jika dibandingkan, perempuan lebih miskin dan membutuhkan dari laki-laki, dan jumlah mereka sedikit lebih banyak dibanding laki-



<http://www.tasyaonline.com/>

laki. Kecuali kalau itu menjadi program pemerintah yang secara khusus dialokasikan bagi perempuan. Lebih sulit lagi, jika mengharapkan ada program penguatan perempuan dari dana tersebut, baik melalui pendidikan, kajian atau penulisan, termasuk yang lebih penting adalah pendampingan perempuan korban kekerasan. Karena persoalan struktur yang sering tidak memihak perempuan ini, Nabi SAW pada akhir hayat berpesan: “*Aku wasiatkan kepada kalian, agar berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan di antara kalian. Padahal, kalian berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka*”. (Hadits Turmudzi no. 1163 dan Ibn Majah 1851).

Pengalokasian dana zakat bagi perempuan, dalam hal ini termasuk pengamalan terhadap wasiat Nabi SAW ini. Lebih dari itu, pengalokasian ini bisa juga masuk pada katagori *riqab* dan *fi sabilillah*. *Riqab*, yang pada awalnya dimaknai sebagai para budak dan hamba sahaya, saat ini mereka sudah tidak ada lagi. Tetapi makna yang terkandung adalah

keterpurukan dan keterjeratan pada kondisi yang menyebabkan kehidupan sebagai manusia dengan hak-hak dasarnya tidak memadai. Sementara *fi sabilillah*, telah dimaknai ulama sebagai kemaslahatan umum. Dan penguatan perempuan adalah kemaslahatan yang paling utama, karena akan memperbaiki relasi kemanusiaan yang paling dasar, yaitu jenis kelamin. Sehingga keadilan bisa dirasakan, sejak relasi kemanusiaan yang paling dasar, laki-laki dan perempuan. Dari dana zakat ini, ada dua agenda untuk penguatan perempuan. Pertama, yang mendesak adalah untuk pendampingan perempuan korban kekerasan dan untuk perbaikan pelayanan reproduksi perempuan. Dua hal ini adalah sesuatu yang paling mendasar, yang kehidupan manusia sangat bergantung kepadanya. Agenda kedua adalah yang jangka panjang, yaitu penguatan hak-hak perempuan untuk transformasi sosial. Penguatan ini bukan merupakan perebutan hak dari laki-laki, apalagi balas dendam, tetapi dalam rangka penciptaan kehidupan yang lebih baik dan lebih berkeadilan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Transformasi juga merupakan upaya penghapusan terhadap segala bentuk kekerasan, ketidak-adilan, penindasan, diskriminasi dan dominasi dalam setiap relasi laki-laki dan perempuan, pada seluruh wilayah sosial, politik, maupun ekonomi. Jika kita yakin bahwa dana zakat dialokasikan untuk penguatan masyarakat miskin dan marjinal, maka *pentasarufan* dana ini bagi program-program penguatan perempuan adalah suatu keniscayaan.

Sebagai penutup, bisa dikatakan bahwa kemiskinan memang bukanlah aib seperti yang disinyalir dari beberapa teks hadits, tetapi pada praktiknya ia sangat menyakitkan dan mendiskriminasikan. Jika Islam adalah agama yang akan membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, maka segala upaya harus dilakukan. Diantaranya dengan menanggulangi kemiskinan. Dan jika Islam selalu mendahulukan orang yang lebih miskin, papa dan lemah, maka perempuan seharusnya didahulukan karena alasan ketimpangan struktural yang sedemikian akut. Kemiskinan perempuan, pada dasarnya hampir sama dengan peran domestik perempuan. Jika itu merupakan pilihan sadar perempuan, maka pasti akan memberdayakan dan tidak merendahkan perempuan. Tetapi jika menjadi suatu takdir struktural yang dipaksakan, ia pasti akan merendahkan dan melecehkan. Karena itu harus diselesaikan. *Wallahu a'lam wa Huwa al-Musta'an*. ❁



Pemberdayaan Sosial ala Muhammad Shahrur: Menafsir Al-Quran dengan Perspektif Keadilan

Oleh: Nur Achmad

Satu lagi pemikir Muslim yang mengajak membaca Al-Quran dengan cara baru atau yang ia namakan *qira'ah mu'ashirah* (bacaan kontemporer). Dengan membaca Al-Quran secara baru ini diharapkan Al-Quran akan lebih menampilkan misinya membebaskan manusia dari belenggu-belenggu, termasuk belenggu pemikiran, dan bisa menjawab tantangan peradaban. Dengan pembacaan kontemporer ini, Al-Quran akan semakin tampak substansinya sebagai *hudan li al-nas* (petunjuk bagi manusia), bukan sekadar membaca tanpa menangkap "ruh" (substansi) Al-Quran.

Pemikir asal Syiria yang juga seorang insinyur ini menawarkan beberapa penafsiran baru terhadap ayat Al-Quran, di samping juga membuat dasar-dasar baru dalam disiplin metodologi fiqh Islam. Ia memulai dengan mendefinisikan beberapa hal dasar, misalnya bahwa Al-Quran itu final dan berlaku abadi, tetapi pemahaman dan penafsiran terhadapnya tetap selalu relatif (tidak bisa diabsolutkan). Karenanya, setiap generasi bisa saja berbeda dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Gagasan-gagasan tersebut dituangkan dalam bukunya yang masih langka yaitu: *al-Kitab wa al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah* (diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, *Prinsip dan Dasa Hermeneutika Al-Quran Kontemporer*, 2004) dan satu lagi, *Dirasat Islamiyyah Mu'ashirah: Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqhi al-Islamiy* (diterjemahkan dengan judul, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 2004).

Melalui karya-karyanya, Shahrur mencoba menafsirkan ayat-ayat bertema sosial-kemasyarakatan dengan perspektif keadilan dan prinsip universalitas Islam, misalnya ayat tentang wasiat dan warisan, poligami dan pernikahan, kepemimpinan, dan pakaian. Walaupun bukan *mufassir* (dalam arti biasa), ia berusaha membuat beberapa pokok pikiran tentang metode membaca dan memahami Al-Quran. Salah satunya yang penting adalah, bahwa Al-Qur'an adalah satu kesatuan, antar surat dan ayat, sehingga Al-Quran tidak bisa dipahami dari satu pendekatan saja. Ajaran-ajaran dasar Al-Quran, seperti keadilan, persamaan derajat, musyawarah, dan lain-lain menjadi tolok ukur dalam memahami Al-Quran itu

sendiri agar tidak kehilangan substansi.

Dari metode yang ditawarkan, ternyata menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Walaupun Shahrur tetap berpendirian bahwa hasil bacaannya bukanlah final. Baginya, finalisasi hasil bacaan sebagai hal mutlak benar adalah sebuah kekeliruan dan ini merupakan bentuk syirik kepada Allah dalam hal ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa contoh hasil bacaan Shahrur, misalnya, ketika ia menafsirkan QS. Al Nisa': 1-6 ayat tentang perintah bertakwa, pernikahan, hubungan silaturrahim, pemeliharaan anak yatim, poligami terhadap janda-janda *syuhada* perang, ia mengaitkan secara langsung dengan pembelaan terhadap para janda yang lemah dan anak-anak yatim yang ayahnya telah gugur. Ia pun berkesimpulan bahwa poligami itu dibolehkan dengan dua syarat yang harus dipenuhi: *pertama*, calon isteri kedua, ketiga, dan keempat adalah janda yang memiliki anak-anak kandung yatim; *kedua*, harus ada sikap dan berlaku adil kepada istri-istri (jika berpoligami) dan anak-anak yatim yang dalam asuhan para janda tersebut. Jika kedua syarat yang berat ini dipenuhi, poligami menjadi boleh. Shahrur lebih melihat alasan pemberdayaan sosial, dibanding alasan lain yang cenderung tak berdasar.

Ini tentu berbeda dengan pendapat lainnya yang cenderung pro atau kontra sama sekali. Bagi yang propoligami, apapun alasannya, poligami adalah boleh, bahkan sunnah, dengan sejumlah argumen yang terkadang dibuat-buat. Sementara yang lain, apapun alasannya, poligami adalah terlarang. Pendapat Shahrur yang sepertinya terkesan membolehkan poligami, padahal sesungguhnya ia tidak sependapat, karena syarat yang diajukan (seperti yang ia pahami dari teks dan konteks ayat), sangat sulit dipenuhi oleh manusia biasa.

Shahrur membaca konteks ayat tersebut secara cermat dan utuh sehingga ia dengan tegas menolak jika poligami dilatarbelakangi oleh keadaan-keadaan berikut: jika istri tidak berketurunan (mandul); keadaan syahwat laki-laki yang tinggi; keadaan istri yang sakit berkepanjangan dan lemah. Ia menolak alasan tersebut karena keadaan-keadaan tersebut,

bisa saja terjadi pada si suami. Artinya, bisa saja si suami yang justru mandul; suami nafsunya rendah di bawah rata-rata; yang sakit berkepanjangan dan menderita kelemahan adalah suami. Jika keadaannya demikian, apakah perempuan boleh berpoliandri? Ini tentu akan menjadi masalah tersendiri dan cenderung melebar serta jauh dari cita-cita keadilan. Maka Shahrur pun menolak tegas poligami dengan alasan-alasan tersebut. (Shahrur, *Metodologi Fiqh...* 2004, hal. 425-434).

Shahrur kemudian menekankan pentingnya penguatan kelompok *mustadh'afin* (lemah dan dilemahkan), dalam konteks ayat ini adalah para janda yang suaminya gugur di medan perang dan anak-anak yatim di bawah asuhannya. Dengan demikian, konteks umum surat *Al-Nisa'* : 1-6 adalah perintah pemberdayaan sosial, penegakan keadilan, pembelaan bagi yang lemah (atau dilemahkan), pembelaan dan pengayoman korban perang, bukan ajaran atau perintah mencari istri alternatif. Ini yang membedakan tafsiran Shahrur dari tafsir-tafsir lainnya.

Tentang wasiat dan warisan, Shahrur menawarkan penafsiran dengan melibatkan ilmu matematika modern (bukan tradisional yang hanya berkuat pada menambah, mengurangi, membagi, dan mengalikan). Shahrur pun melibatkan konsep Rene Descartes yang telah meletakkan dasar-dasar analisis matematis modern yang memadukan antara hiperbola (*al-kamm al-muttashil*) dan parabola (*al-kamm al-munfashil*). Shahrur juga mengambil pendapat Isaac Newton tentang analisis matematis tentang konsep turunan (*diferensial/al-mushtaq*) dan integral (*al-takamul*), juga menggunakan teori himpunan (*nazariyat al-majmu'at*). Dengan penggunaan sejumlah perangkat matematika modern ini Shahrur menemukan bahwa telah terjadi kesalahpahaman yang serius dalam umat Islam kaitannya dengan hubungan anatara wasiat dan warisan. Shahrur membedakan bahwa ayat-ayat warisan bersifat umum dan ayat-ayat wasiat bersifat khusus. Ia berpendapat bahwa banyak orang melupakan ayat wasiat, padahal ayat wasiat harus lebih didahulukan sebelum ayat warisan. Jika ayat-ayat wasiat dilaksanakan, maka ayat-ayat waris menjadi alternatif terakhir jika masih ada sisa harta peninggalan si mayit.

Dalam hal wasiat, Allah memberikan kemerdekaan bagi manusia untuk menentukan jumlah wasiat, tetapi dalam hal warisan Allah menentukan batasan-batasan. Karenanya, redaksi yang digunakan Allah dalam konteks wasiat adalah *nashiban mafrudha* (bagian yang ditentukan oleh manusia dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan).

Sementara Allah menggunakan redaksi *faridhatan minallah* (ketentuan pasti dari Allah) ketika membicarakan warisan. Ini artinya, Allah memberi kesempatan hamba-Nya yang bertakwa (*haqqan 'ala al-muttaqin*) untuk mendahulukan wasiat (dari pada warisan) selaras dengan ayat *shiyam* dan ayat tentang *qishash*. Perlu diingat bahwa tema puasa (*kutiba 'alaikum al-shiyam*) diawali dengan tema *qishash* (*kutiba 'alaikum al-qishash*) dan tema wasiat (*kutiba 'alaikum idza hadhara ahadakum almautu in taraka khairan al-washiyyatu...*) (QS. 2: 180). Dengan mendahulukan wasiat daripada warisan yang dipahami dari ayat *min ba'di washiyyatin yusha biha aw dain...*, diharapkan perpindahan harta bisa terlaksana secara damai, adil, dan *ma'ruf*. (Shahrur, 2004: 317-416).

Shahrur juga menafsirkan tentang ayat kepemimpinan yang termaktub dalam QS. Al Nisa: 34. Shahrur menyatakan bahwa *Qiwamah* (kepemimpinan) adalah milik laki-laki dan perempuan. Ia bukan monopoli kaum laki-laki saja. Bagi Shahrur, ayat yang bunyinya: *al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa...* tidak bisa dipahami dengan: *al-dzukuru qawwamuna 'ala al-inats*. Firman Allah jelas bahwa *al-rijal qawwamun 'ala al-nisa'*, artinya, *rajul* adalah orang dewasa dan *imra'ah* (jamaknya, *nisa'*) adalah perempuan dewasa. *Qawwamun* berarti *khadam* (pelayan). Jadi kaum laki-laki adalah pelayan (ada untuk melayani) kaum perempuan. Ketika ayat tersebut diteruskan, *bima fadh-dhalallahu ba'dhahum 'ala ba'dhin...*, maka potensi *qiwamah* ada pada laki-laki dan sekaligus perempuan. Ini tentu berbeda dengan penafsiran-penafsiran selama ini yang cenderung menafikan potensi kepemimpinan pada diri makhluk Allah berjenis kelamin perempuan. Kesimpulan yang menurut Shahrur perlu diluruskan. Seandainya ayat ini dipahami bahwa kepemimpinan hanya bagi kaum laki-laki saja, tidak bagi perempuan, maka bunyinya bukan *ba'dhahum min ba'dhin* (sebagian laki-laki atas sebagian) tetapi *ba'dhuhum min ba'dhihinna* (sebagian laki-laki atas sebagaian perempuan). (Shahrur, 2004, hal. 441-461).

Terhadap penafsiran ayat lainnya, Shahrur pun lebih melihatnya dari sisi keadilan dan persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Shahrur telah memberikan cara baca yang unik dan sangat hati-hati (*ihdiyath*) sehingga sesuai dengan pemahamannya bahwa Al Qur'an adalah sesuai dan relevan dengan segala kondisi. Dengan begitu, menurutnya, seakan Nabi Muhammad SAW baru saja wafat dan menyampaikan Al-Quran kepada kita. *Wallahu a'lam* ❀

Perempuan dan Kemiskinan di Bangladesh

Titik tolak yang menjadi paradigma berpikir pelayanan keuangan kepada perempuan miskin di Bangladesh adalah kepercayaan pemerintah kepada perempuan miskin itu sendiri. Pemerintah juga tidak pernah membedakan apakah yang mengajukan permohonan ke bank adalah perempuan atau laki-laki.

Bangladesh adalah negara dengan 132 juta penduduk dan merupakan negara berpenduduk terpadat nomor 8 di dunia. Negara yang baru 33 tahun merdeka ini memiliki pendapatan 380 US\$ pertahun. Bangladesh juga disebut sebagai 'simbol kemiskinan Asia' sehingga pakar kemiskinan di seluruh dunia mungkin tidak akan dapat disebut pakar jika belum mempelajari masalah kemiskinan di Bangladesh.

Sejak abad ke-12 hingga 13, Bangladesh berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu atau Budha. Kemudian, pada abad ke-13, pengaruh Islam masuk ke wilayah ini, sehingga mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pada tahun 1757, Inggris menjajah anak benua India, termasuk Bangladesh. Ketika Inggris angkat kaki dari kawasan itu, pada tahun 1947 berdirilah negara Islam Pakistan, yang wilayahnya juga meliputi Bangladesh. Namun, pada tahun 1971, Bangladesh memisahkan diri dan menjadi negara yang independen.

Dari 132 juta penduduk, 90% populasi Bangladesh beragama Islam, dan sisanya Hindu, Budha, dan Kristen. Kondisi penduduk Bangladesh yang

sebagian besarnya miskin dan perekonomian negara yang lemah, membuat negara ini menjadi wilayah yang rentan konflik dan rentan akan masalah kemiskinan. Apalagi dengan melihat penduduk Bangladesh yang kebanyakan berada di daerah pegunungan dan bersuku-suku yang membuat komunikasi dan akses informasi menjadi lebih sulit.

Di sebagian masyarakat Bangladesh, perempuan sering dianjurkan untuk memulai keluarga pada usia muda (pernikahan dini), sehingga proporsi perempuan yang melahirkan anak pada usia 18 tahun di Bangladesh adalah 50% dari total jumlah perempuan produktif di Bangladesh. Jika dibandingkan dengan negara di Amerika Latin dan Karibia, jumlah perempuan yang melahirkan di dua negara tersebut hanya sekitar 12-28% perempuan dari total jumlah perempuan. Anjuran ini pula yang membuat perempuan Bangladesh sering terhimpit pada masalah keluarga, masalah nafkah dan kemiskinan.

Berawal dari kepercayaan kepada orang miskin

Apakah orang miskin dapat dipercaya? Bukanlah akibat terdesak akan kemiskinannya, mereka akan mudah "tergelincir" melakukan hal yang menguntungkan mereka sendiri dan bersifat jangka pendek? Benarkah pertanyaan itu?

Pertanyaan yang seperti meragukan orang miskin ini mungkin tidak patut dipertanyakan kepada orang miskin di Bangladesh. Bangladesh adalah sebuah negara yang miskin, tapi menyimpan "mutiara". Kepercayaan pada orang miskin itulah cikal bakal munculnya "mutiara" itu.

Pemerintah Bangladesh mencoba memberikan kepercayaan besar kepada orang miskin untuk mengelola pinjaman dari pemerintah, pinjaman tersebut dikelola oleh bank pemerintah. Padahal di penjuru dunia, lembaga keuangan hanya melayani mereka yang dianggap memenuhi syarat bank. Misalnya mereka yang memiliki (jaminan fisik), dll. Seandainya mempunyai usaha, mereka pun harus memiliki badan hukum, laporan keuangan, mampu membuat proposal dan rencana bisnis.

Dijamin, meski orang miskin mempunyai usaha yang berpotensi di masa akan datang, mereka

tentunya akan segera tercoret akibat berbagai kriteria tadi. Orang miskin, lalu dianggap tak layak dilayani bank. Oleh karena itu tak mengherankan, rakyat miskin selalu tersingkir dan semakin tersingkir.

Menggambarkan situasi yang ada, ilustrasi dari CGAP (*Consultative Group to Assist the Poorest*) dari Bank Dunia sangatlah tepat. *Water, water everywhere but no drop for a drink*, artinya meski uang (capital) begitu banyak (di bank), namun tak mampu dijangkau orang miskin. Teriris benar hati ini bila tiba-tiba mengingat situasi Indonesia, dimana kredit bank saja harus dibayar secara mahal oleh rakyat sebanyak Rp 650 trilyun, namun mereka tak menikmati apa yang dibayar mahal itu.

Realitas rakyat miskin seperti di Indonesia tadi tidaklah terjadi di Bangladesh. Negara tersebut merupakan satu-satunya di dunia, dimana 75% penduduk miskinnya mendapat pelayanan keuangan dari lembaga keuangan, baik bank maupun non bank. Tingkat pengembalian pinjaman sekitar 14 juta keluarga miskin itu juga menakjubkan, meski dengan bunga komersial dan tanpa jaminan atau pun berbagai persyaratan rumit lain. Untuk lembaga keuangan kecil sekitar 98% dan lembaga keuangan besar sebesar 99,5% dikembalikan pada waktunya (bank di Indonesia pun sulit menyamainya).

Melalui proses tersebut di atas, hal yang *impossible* menjadi *possible*. Setelah mendapat pelayanan keuangan, berbagai usaha rakyat miskin yang kecil-kecil namun *massif* menjadi berkembang. Grameen Bank yang mulai merintis pelayanan keuangan pada rakyat miskin itu, terutama kepada para perempuan miskin, kini kliennya mencapai 3,2 juta keluarga miskin. Dari penelitian yang dilakukan, dilaporkan 42% keluarga yang dilayani telah keluar dari kemiskinan (2001).

Akibat pengalaman keberhasilan dalam pelayanan keuangan pada rakyat miskin itu, Bangladesh lalu dikenal sebagai *motherland of microfinance* (ibu dari usaha kecil) yang sering juga disebut *banking the unbankable* (bank yang tidak memberlakukan syarat-syarat bank). Berbagai model pelayanan keuangan pada masyarakat miskin dari Bangladesh ini, telah direplikasikan pada sekitar 40 negara (Asia Pasifik, Afrika, Amerika Latin dan Eropa).

Keberhasilan Bangladesh mengembangkan pelayanan keuangan bagi masyarakat miskin tak bisa dilepaskan dari peran seorang intelektual, yaitu Profesor Muhammad Yunus. Beliau adalah seorang guru besar ekonomi yang tergoncang hatinya

menyaksikan kelaparan yang menelan jutaan korban meninggal di Bangladesh pada tahun 1974.

Tentu apa yang didapatkan Profesor Yunus tidaklah datang dari langit begitu saja. Beliau terjun ke bawah, terlibat dan mencoba memahami karakteristik masyarakat. Melalui *action research*, tokoh intelektual tersebut lalu merumuskan konsep-konsep pengembangan masyarakat. Tak sampai di situ saja, beliau juga meyakinkan pihak pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga (donor) internasional.

Usaha dari Profesor Yunus tidaklah sia-sia, lalu berdirilah Grameen Bank. Lembaga keuangan tersebut khusus melayani rakyat miskin (perempuan) dan sangat terkenal di dunia. Bahkan, akhirnya didirikan pula semacam *wholesale fund* yang dinamakan *Grameen Trust*, untuk mendukung Grameen Bank di seluruh dunia. Hingga kini 113 organisasi di berbagai negara telah didukung, total pinjaman yang diberikan untuk masyarakat miskin, telah mencapai US \$ 374 juta (Rp 3,2 trilyun).

Kepercayaan Pemerintah kepada perempuan

Titik tolak yang menjadi paradigma berpikir pelayanan keuangan kepada perempuan miskin di Bangladesh adalah kepercayaan pemerintah kepada perempuan miskin itu sendiri. Pemerintah juga tidak pernah membedakan apakah yang mengajukan permohonan ke bank adalah perempuan atau laki-laki. Dengan kepercayaan tersebut dan dengan memahami kelebihan berikut kekurangannya, masyarakat miskin Bangladesh, terutama para perempuan miskin dilayani sesuai karakteristiknya sehingga mereka dapat berkembang. Peran pemerintah yang utama dalam hal ini adalah mengakui keberadaan lembaga keuangan mikro yang dikelola oleh perempuan dan memberikan keleluasaan pada lembaga tersebut untuk beraktivitas.

Dari pengalaman di Bangladesh tersebut, Indonesia sesungguhnya dapat meniru cara pemerataan kesejahteraan ekonomi yang dilakukan pemerintah Bangladesh melalui sistem bank rakyat dan usaha mikro kreditnya. Di samping itu pemerintah pun harus menyadari bahwa kemiskinan dan pengangguran tidak seharusnya menjadi momok, akan tetapi menjadi tantangan untuk dapat semakin mengembangkan diri dan mengentaskan kemiskina secara bersama-sama.

(dd, ditulis kembali dari berbagai sumber)

Kegairahan Perempuan Aceh Memutar Roda Perekonomian

TERUS-menerus membicarakan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh tanpa disertai dengan kerja lapangan yang serius dan terarah bisa-bisa hanya menjadi sebuah rekomendasi yang mandek di atas kertas. Dana miliaran bahkan triliunan rupiah pun bisa jadi habis sia-sia. Pemerintah dibantu lembaga non pemerintah, baik dalam negeri maupun asing, memang sudah bekerja sejak beberapa saat setelah tragedi tsunami, 26 Desember 2004 lalu. Enam bulan sudah berlalu, dan ternyata masih banyak korban yang merasa belum tersentuh.

Fauziah menuturkan, dua pekan lalu dia kembali lagi ke Aceh, menengok tanah kelahirannya. Namun, apa yang dia lihat masih juga membuatnya terpana. "Ternyata, masyarakat Aceh masih tinggal di tenda-tenda, padahal ada badai dan angin. Di Meulaboh, barak atau rumah bahkan belum terbangun. Tiga bulan pertama, bantuan datang dengan deras, namun akhir-akhir ini apa-apa selalu ditahan. Orang di Jakarta membicarakan Aceh, namun di Aceh sendiri tidak terjadi apa-apa. Bagaimana mau membangun ekonomi?" paparnya panjang.

Sebagai perempuan, pantas Fauziah dapat merasakan derita kaumnya di sana. Hasil penelitian lembaga kemanusiaan internasional Oxfam menyebutkan, korban tragedi tsunami di Aceh, India, dan Sri Lanka mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Sekitar 170.000 perempuan dari 183.000 jiwa telah terenggut nyawanya.

Meskipun demikian, tradisi masyarakat Aceh sebenarnya mengakui peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Dalam bahasa Ratna dari Yayasan Iskandar Muda yang juga kelahiran Aceh, perempuan Aceh adalah pemilik rumah. "Perempuan dibelikan rumah oleh orangtuanya saat mau menikah," papar Ratna.

Tegasnya, perempuan adalah penopang keluarga dan sumber kekuatan buat anak-anaknya sehingga dalam proses membangun kembali Aceh sudah seharusnya perempuan menjadi salah satu *stakeholder* yang setara dengan pihak-pihak lain.

Koordinator Nasional Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) Nani Zulminarni, seperti diutarakan Mindrianingsih juga dari Pekka, menyatakan ketakjubannya ketika melihat kesibukan di Desa Lancang, Jeunib, Kabupaten Bireuen, terdengar suara ketok palu, gergaji, dan kayu yang terbanting di lantai. Sejumlah ibu ternyata sedang mengawasi para tukang bangunan yang tengah membangun rumah. Di pinggir jalan, terlihat ladang garam yang terolah dan tungku pembuatan garam sedang menyala, pertanda roda ekonomi mulai berputar. Semua itu dilakukan dan dikelola kaum ibu dengan didampingi kader Pekka.

"Perempuan Aceh sendiri yang mempunyai konsep, karena mereka yang tahu kondisi lingkungannya dengan pendekatan kearifan lokal," kata Mindrianingsih dalam Seminar "Empowering Women in Aceh" yang diselenggarakan Rahmania Foundation dan didukung *The Japan Foundation*, Unicef, UNDP, dan Peace Network, Rabu (15/6).



acehnewsfm.com

Hingga kini sejak tahun 2001, terdapat 44 organisasi komunitas Pekka dengan jumlah anggota lebih dari 1.000 rumah tangga yang dikepalai perempuan.

Bergairah kembali

Para perempuan Aceh saat ini mulai bergairah lagi bekerja dan membangun ekonomi mikro dengan mendirikan kelompok-kelompok kerja. Direktur Eksekutif Badan Amil Zakat Nasional Emmy Hamidiyah menuturkan, setelah mendirikan tujuh rumah singgah, empat di Banda Aceh dan Aceh Besar, dua di Meulaboh, dan satu di Sigli untuk anak usia 4-15 tahun, pihaknya juga mendirikan lagi semacam bank simpan pinjam yang manajer serta karyawannya semuanya perempuan.

“Sudah ada empat yang berdiri. Salah satu adalah Baiturahman. Dulu, sebenarnya ini sudah ada, nasabahnya 50 persen perempuan, namun 60 persennya meninggal karena tsunami. Saat ini, para perempuan mulai bergairah lagi dan nasabahnya mulai banyak lagi. Kini mencapai sekitar 1.000 orang,” tutur Emmy.

“Pasar-pasar sudah mulai ada pedagangnya. Pasar tradisional di bekas Terminal Kedah juga sebentar lagi berdiri. Para ibu itu ternyata kalau sibuk bekerja, lalu menjadi lupa dengan traumanya,” ujar Emmy.

Tidak hanya itu, ada 20 perempuan yang juga sudah mempunyai bengkel sepeda motor sendiri. Sungguh kemajuan yang menggembirakan.

Menurut Emmy, penguatan ekonomi masyarakat tepat jika dimulai dari pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi sebab perempuan dan anak-anak adalah kelompok yang paling menderita dalam kemiskinan keluarga. Kaum perempuan sangat cocok bekerja sebagai pengusaha. Data menunjukkan, 46,23 persen perempuan merupakan pelaku ekonomi.

Perempuan Aceh diyakini mampu memutar uang kredit. Di Indonesia banyak model pemberdayaan perempuan melalui koperasi, misalnya Koperasi Mekar Saluyu di Subang. Koperasi yang berawal dari pengajian 20 perempuan tani dengan modal Rp 20.000 per orang pada tahun 1986 ini, kini telah berkembang anggotanya menjadi 1.200 orang dengan aset Rp 2 miliar.

Beri kepercayaan

Berbagai tawaran pengembangan ekonomi mikro



suara merdeka.com

untuk perempuan memang hanya bisa berhasil jika perempuan diberi kepercayaan seluas-luasnya untuk melaksanakannya. Hanya saja, yang terjadi di Aceh tidaklah semulus itu. Masih banyak pihak mencibir dan meremehkan perempuan.

“Kendala masih juga karena budaya patriarki yang tertanam kuat sekali. Perempuan mau membangun rumah saja sangat sulit karena tidak dipercaya. Banyak tangan mau ikut campur, bahkan dari pak Camat yang bertanya-tanya dari mana dapat kayunya? Apa perempuan bisa?” ujar Mindrianingsih.

Padahal, sudah terbukti dengan dana “hanya” Rp 150 juta, perempuan Aceh bisa membangun sembilan unit rumah semi permanen. Bagian bawah dari beton, atas papan, dan atap seng, dengan ukuran 6 x 7 meter. Meski bukan mereka yang mengayunkan palu, mereka justru menjadi manajer.

Seperti dikatakan Adriani S. Soemantri (Jurnal Perempuan 04, 2005), “Perempuan pelaku usaha mikro akan menghadapi tantangan nilai-nilai hirarkis dan hegemonik yang ada dalam seluruh infrastruktur ekonomi, mulai dari bahan baku sampai pelatihan, mulai pasar sampai permodalan”. Begitulah perempuan Aceh berjuang untuk perbaikan ekonominya. Bergairah, namun tetap banyak kendala. (sumber dari KOMPAS). (dd)



<http://www.flickr.com/photos/urbanpoor>

DEMONSTRASI--Massa aksi koalisi tolak perpres 36/2005 (tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.) dalam perjalanan ke istana

UPC • Bergerak Bersama • Kaum *Mustad'afin*

Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, mungkin *Urban Poor Consortium* (UPC) bukanlah nama baru. Lembaga yang berdiri pada September 1997 adalah organisasi non-pemerintah yang bekerja bersama komunitas miskin di wilayah perkotaan. Biasanya UPC identik dengan para tukang becak, ibu-ibu miskin, atau para pedagang kaki lima yang kerap melakukan demonstrasi ke pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta.

Walaupun UPC bergerak pada isu kemiskinan secara umum, dalam artian baik itu kemiskinan yang dialami laki-laki maupun perempuan, namun isu perempuan tidak pernah luput dari perhatiannya. Hal ini juga diterapkan dalam setiap cara kerja UPC yang menerapkan

system partisipasi dan kesetaraan dengan tanpa memandang kelas, ras, agama, dan jenis kelamin. Dalam hal ini, UPC melakukan semua kegiatan dengan menjadikan orang miskin sebagai pelaku (subyek) perubahan. Kemiskinan bukan sebuah takdir seperti yang sering dikatakan orang, tetapi kemiskinan dibentuk oleh pemerintah sendiri

Wardah Hafid adalah salah satu sosok perempuan yang selalu muncul atas nama UPC. Hal itu karena Wardah yang adalah salah satu orang yang dipercaya memegang tali kendali UPC. Menurutnya keberadaan UPC adalah untuk mewujudkan cita-cita rakyat yang berdaulat, mandiri, arif dan kreatif, mampu memecahkan masalah kemiskinan majemuknya,

UPC percaya bahwa informasi yang akurat dan relevan mampu mendorong orang untuk bertindak sendiri atau secara kolektif untuk mengubah realitas yang tidak adil dan menindas.

memenuhi kebutuhan praktis dan strategisnya dan menentukan nasib serta masa depan diri dan komunitasnya. Dalam hal ini, perempuan miskinpun harus dapat berdaya dengan mendorong mereka untuk mandiri, kreatif, dan arif.

Untuk melakukan setiap kerja-kerjanya, UPC memfokuskan gerakan penumbuhan kesadaran kritis rakyat melalui penyebar-luasan informasi. UPC percaya bahwa informasi yang akurat dan relevan mampu mendorong orang untuk bertindak sendiri atau secara kolektif untuk mengubah realitas yang tidak adil dan menindas. Melalui informasi pula perempuan di UPC dapat lebih memiliki wawasan dan lebih berani mengambil keputusan. Bersama UPC, laki-laki dan perempuan miskin dari kelompok kerja manapun mendapatkan ruang kesadaran baru yaitu kesadaran politis dan kesadaran untuk berkehendak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Gerak semacam inilah yang akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan rakyat yang terorganisasi dengan baik dan kuat. Jika perempuan miskin dapat bekerja bersama maka paling tidak dari situ akan dapat diwujudkan kehidupan sosial yang adil dan demokratis.

Berbagai kegiatan yang dilakukan UPC sebagai wujud dari strateginya adalah dengan melakukan penyebarluasan informasi dan penumbuhan

media ekspresi rakyat miskin dengan sarana multimedia; advokasi; penumbuhan organisasi tingkat basis; pengembangan jaringan kerja antar kampung miskin dan kelompok-kelompok rakyat miskin kota; dan pemenuhan kebutuhan praktis komunitas seperti kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan perbaikan permukiman.

Sebagai sebuah organisasi dengan bentuk forum kerja dengan pengorganisasian yang lentur dan terbuka, UPC tidak bekerja sendiri, bersamanya ada jaringan kerja lain seperti Bakti Pertiwi, LBH APIK, LBH Jakarta, Kembang Pala, SEBAJA, *Urban Poor Community Network*. Rahima pun pernah ikut serta dalam salah satu pelatihan *community organizer* (CO) yang dilaksanakan UPC dengan mengutus calon CO nya untuk belajar pengorganisasian. Akhirnya jika anda ingin dapat bersama-sama bergerak bersama kaum *mustad'afin* (kaum yang dilemahkan yang di dalamnya ada fakir miskin), maka mungkin alamat ini akan bermanfaat yaitu Sekretariat UPC yang berada di Billy Moon Blok H I/7 Jakarta 13450, Indonesia Telpon: 62.21.86-42915; 62.21.869002408; Fax: 62.21.86902407. e-mail: upc@centrin.net.id Website UPC: <http://www.urbanpoor.or.id>. Mari bersama mengentaskan kemiskinan! ✨

(Ditulis kembali dari profile UPC oleh daan).



DEMONSTRASI--Aksi ulang tahun Jakarta 478 tanpa busung lapar, tanpa perpres 36/2005 (tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.)

Rahima Berbagi Pengalaman

Pada tanggal 27 Juli 2005, Rahima kembali mendapatkan kehormatan untuk menjadi lembaga kunjungan dari para peserta kursus kajian perempuan dan gender Universitas Indonesia.

Keberadaan *Rahima* sebagai pusat pendidikan dan informasi Islam & hak-hak perempuan saat ini telah menjadikannya sebagai rumah belajar bersama bagi berbagai pihak dan bagi Rahima sendiri dalam menggali pengalaman berkaitan dengan isu hak-hak perempuan dalam Islam. Dalam konteks tersebut pula pada 27 Juli dan 2 Agustus 2005 lalu Rahima mendapatkan kehormatan untuk menjadi tuan rumah bagi para peserta kajian gender Kajian Wanita Universitas Indonesia dan Lembaga Antar Iman Boyolali, terutama untuk saling berbagi isu perempuan.

Pada tanggal 27 Juli 2005, para peserta kajian yang terdiri dari lembaga pemerintahan, perguruan tinggi, LSM dan organisasi lain itu datang ke Rahima dengan tujuan berbagi informasi dan juga untuk berjejaring. Selain itu maksud dari kunjungan lapangan para peserta kursus tersebut adalah untuk mengembangkan kepekaan peserta terutama terhadap kondisi *real* yang dihadapi perempuan dan juga untuk mengetahui atau mendapatkan pemahaman lebih banyak lagi tentang langkah-langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Rahima dalam merespon berbagai persoalan perempuan dalam perspektif Islam.

Walaupun kunjungan dilaksanakan dengan waktu yang relatif singkat, dari jam 15.30 sampai 17.00, namun apresiasi peserta kepada presentasi

tentang berbagai kegiatan Rahima cukup baik. Bahkan beberapa peserta ada yang melakukan kontak dengan Rahima setelah kunjungan untuk melakukan penguatan di jaringannya masing-masing.

Dua minggu kemudian tepatnya tanggal 2 Agustus 2005, kembali Rahima menerima tamu yang kali ini datang dari Boyolali. LBK-UB Boyolali adalah lembaga bhakti kemanusiaan umat beragama yang bergerak pada penguatan peran perempuan di komunitas lintas agama. Lembaga ini didirikan oleh tokoh-tokoh agama di Boyolali atas dasar nilai-nilai kemanusiaan universal. Para teman dari LBK-UB yang berkesempatan datang ada sekitar 7 orang.

Kedatangan teman-teman dari LBK-UB ini menjadi satu kesempatan lagi bagi Rahima sendiri untuk dapat berbagi informasi dan pengalaman tentang bagaimana berjejaring dengan perempuan komunitas lintas agama. Yang menarik dari pertemuan dengan teman-teman dari LBK-UB adalah bagaimana mereka mencoba mensosialisasikan kesetaraan dengan bahasa dan tradisi masyarakat setempat.

Akhirnya, baik kunjungan dari peserta kursus gender Kajian Wanita UI dan teman-teman LBK-UB, semuanya adalah bagian dari proses yang dilewati Rahima untuk dapat terus belajar, bekerja dan berbagi pengalaman. (*Binta*) ❁



dok. Rahima

Da'wah Keadilan Melalui Sholawat



dok.Rahima

Shalawat merupakan salah satu kebudayaan yang sudah lama dikenal di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Shalawat biasanya sering dikumandangkan di berbagai kesempatan seperti yang dikumandangkan seorang Ibu ketika menimang bayinya, pengajian dan *tabligh akbar*, *muktamar* berbagai partai dan organisasi keagamaan Islam, bahkan hingga memasuki gelanggang politik formal seperti terpilihnya seorang Presiden hingga perjanjian diplomatik seperti yang terjadi antara RI dengan pihak GAM.

Di dalam komunitas yang memiliki tradisi keagamaan Islam yang kuat seperti demikian, RAHIMA bekerja memperkenalkan hak-hak perempuan dengan nilai-nilai keislaman, salah satu media yang dipakai adalah melalui sholawat. Ijtihad tersebut muncul melalui sebuah proses kreatif yang dilakukan oleh para Kyai, Nyai Ustadz dan Ustadzah dalam sebuah kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Rahima tentang Islam dan Hak-hak Perempuan pada tahun 2001 lalu. Hingga di tahun 2005 ini, Rahima memperkenalkannya dengan istilah "*Sholawat keadilan*". Sebagian besar masyarakat mengenal sholawat hanya sebagai senandung tanpa lebih banyak mengetahui artinya. Melalui gubahan sholawat karya alumni peserta pelatihan Rahima ini, masyarakat diajak untuk dapat terus mengumandangkan pentingnya keadilan relasi antara laki-laki dan perempuan melalui syair tersebut. "*Shalawat keadilan*" ini merupakan sebuah tembang puji-pujian yang dilantunkan pada Nabi Muhammad SAW atas upaya beliau menanamkan pesan Islam

mengenai relasi kehidupan yang setara dan adil antara lelaki dan perempuan.

Proses kreatif tersebut kemudian dilengkapi oleh Faqihuddin Abdulkadir, salah satu fasilitator training tersebut dengan mencoba mengembangkannya sesuai dengan budaya lokal. *Alumnus University of Damascus Syiria'* ini kemudian bersama-sama dengan para rekannya di Fahmina Institute, Cirebon mencoba mengawinkan 'sholawat gender' dengan beberapa versi berdasarkan budaya setempat. Shalawat Gender ini diperkenalkan secara lebih *intens* kepada masyarakat dalam bentuk rekaman kaset dan keping CD dengan nuansa gamelan Cirebonan. Rahima bersama dengan Fatayat NU Jember, dan Radio Prosalina Jember pun sempat menggelar festival 'sholawat gender' tersebut sebagai langkah sosialisasi.

Kini, Shalawat Keadilan merupakan tembang yang indah dan selalu bergema di dalam berbagai kesempatan. Sebagai musik teman kerja dan teman seperjalanan, kidung pernikahan, dan bahkan dalam bentuk Paduan Suara yang mengiringi seminar dan diskusi di hotel berbintang. Shalawat Keadilan ini juga sampai di kalangan ummat terutama pada ibu-ibu pengajian dan majelis ta'lim di kampung-kampung.

Mudah-mudahan, cita-cita yang selalu bergema melalui sholawat ini dapat menghapuskan berbagai bentuk kekerasan, ketidakadilan, dan membuka kesadaran untuk saling belajar, memberikan pilihan hidup pada setiap individu berdasarkan potesinya menuju kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan lelaki dan perempuan. ❁ (dd & Ning)



dok.Rahima

Islam, Perempuan dan Era Dunia Baru

Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (PSW UIN Suka) Yogyakarta, pada 25 – 29 Juli 2005 yang lalu punya 'hajat' besar yaitu seminar internasional Islam, Perempuan dan Era Dunia Baru (*Islam, Women and The New World Order*). Rahima adalah salah satu lembaga yang diundang oleh PSW UIN Suka tersebut untuk hadir sebagai peserta.

Menurut Dra Siti Ruhaini Dzuhayatin, MA, ketua PSW UIN Sunan Kalijaga, meningkatnya ketegangan antara kaum muslim konservatif dengan Barat akibat peristiwa 11 September 2001, telah memerangkap kaum muslim moderat dan progresif yang mendedikasikan usahanya untuk mendamaikan demokrasi dan hak azasi manusia. Dan kaum perempuan adalah pihak yang paling menderita karena hal-hal yang menyangkut politik "tubuh" perempuan digunakan sebagai arena perdebatan mereka. Sehingga secara umum, sambungnya, maksud diadakannya seminar internasional ini adalah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam yang ditunjukkan dengan meningkatnya taraf hidup kaum perempuan di semua ranah, domestik, publik dan politik.

Perempuan di negara-negara muslim, lanjutnya, menjumpai isu-isu yang sama akibat pengaruh globalisasi. Isu-isu tersebut misalnya HIV/Aids dan perdagangan perempuan & anak. Isu yang lain adalah isu kekerasan terhadap perempuan yang masih berlangsung dan dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka seperti suami, saudara laki-laki (paman, kakak laki-laki, adik laki-laki, keponakan, ayah, kakek, dll), masyarakat, negara, bahkan jaringan kejahatan internasional.

Topik yang diperbincangkan dalam seminar ini antara lain : *Islam and the New World Order: Torn between Terrorism and Self Identity, Islamic Revivalism and It's impact, on Women's Rights, Women and Rights at home: Review of Marriage & Family Law in Muslim Countries, Women and Global Issues, Women and Violence in Muslim Countries dan Constructing Interpretation and the Importance of the Socio-Historical Context of the Qur'an*, dan dipresentasikan oleh narasumber-narasumber yang berasal dari Inggris (Ziba Mir Hosseini), Pakistan (Tahmina Rasyid), Afrika Selatan (Farid Esack),



Malaysia (Zaleha Komaruddin) dan Indonesia (Azyumardi Azra, Meiwita Budiharsana, Mochtar Mas'ud, Amin Abdullah, dll).

Prof Khaled Abou El Fadl, profesor bidang hukum Islam dari UCLA (University of California) bertindak sebagai *keynote speech*, mempresentasikan makalahnya yang berjudul "*Faith-Based Assumptions and Determination Demeaning to Women*" (Asumsi-asumsi berdasarkan kepercayaan dan ketentuan-ketentuan yang merendahkan perempuan). Diakhir presentasinya beliau mengatakan bahwa "Jika Islam adalah sebuah pesan umum maka wacana moralitas dan keadilannya seharusnya di cari di luar batasan setiap kebudayaan yang mempunyai hukum dan peraturannya sendiri. Saya tidak menganjurkan penggunaan hukum secara universal, saya juga tidak menganjurkan penghapusan hal-hal khusus dari kebudayaan-kebudayaan yang ada. Pada dasarnya, hal ini tampak seperti mengamalkan perintah Tuhan berarti mengamalkan keadilan. Dan mengamalkan keadilan sungguh berarti terlibat di dalam pencarian untuk keadilan, moralitas dan kemanusiaan. Cobaan dan tantangan untuk mencapai pengertian tentang keseimbangan dan ketenangan hati kita seharusnya dengan selalu mencoba mengajukan pertanyaan berikut: apakah ini jujur? apakah ini adil? Dan pada akhirnya 'Allah tahu yang terbaik'".

Seminar internasional di Yogyakarta ini dihadiri oleh kurang lebih 100 peserta dari berbagai macam latar belakang seperti aktivis kesetaraan gender, aktivis hak azasi manusia, akademisi, NGO, organisasi massa keagamaan, dan lain lain yang berasal dari Iran, Yaman, Mesir, Pakistan, Nigeria, India, Saudi Arabia, Thailand, Malaysia, Philippina dan Indonesia. (**dani**)✽

Membangun Sebuah Teologi yang Peduli Gender

Judul Buku	: Perempuan Dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia
Penerbit	: Pilar Media
Tahun Terbit	: Agustus 2005
Tebal	: xl + 230 hlm
Penulis	: Nur Said



Ada sebuah pertanyaan menarik dari salah seorang tokoh feminisme Islam asal Pakistan yakni Dr. Riffat Hassan : mengapa jika ada proses “islamisasi” di suatu negara, pihak perempuan selalu menjadi masalah pertama yang harus dibenahi? Jawabannya tentu saja karena masalah lain (katakanlah konsep negara Islam) secara konsepsional sangatlah sulit. Sebagai kompensasi dari “kesulitan” tersebut, cara yang dianggap mudah adalah menciptakan seperangkat peraturan bagi makhluk yang bernama perempuan; mewajibkan mereka berjilbab, melarang mereka untuk keluar rumah dan membatasi aktifitas sosial mereka hanya sebatas sumur – dapur – kasur.

Hampir ratusan tahun (bahkan mungkin seumur perkembangan agama ini sendiri), nasib perempuan dalam Islam hampir selalu diidentikkan dengan patriarkhisme kultur Arab lengkap dengan simbol perempuan bercadar dan harem-haremnya. Ini tak lain terjadi disebabkan oleh adanya sebuah upaya pendekatan metodologi penafsiran Islam (baca: Al Qur’an dan Al Hadits) yang melulu bercorak *Ara-bic sentries* dan bias gender. Akibatnya tak heran jika kemudian teks–teks suci seperti Al Qur’an dan Hadits, seringkali “dimanfaatkan” sebagai alat politik paling efektif dari kaum laki–laki untuk menguasai perempuan. Sebagai contoh misalnya eksistensi sebuah hadits yang menyatakan bahwa perempuan tak lebih hanya sebagai bagian tulang rusuk Adam yang sangat sulit diluruskan. Pendek kata *image* yang sangat populer beredar adalah Islam merupakan agama yang kesannya sama sekali tidak memiliki minat mengangkat derajat kaum perempuan. Inilah realitas yang secara pukol rata, “diperkosa” oleh Barat sebagai imajinasi Islam.

Sesungguhnya pembuatan buku ini berpijak dari

kenyataan – kenyataan di atas. Sebagai seorang pengamat masalah – masalah yang berkaitan dengan teologi Islam, Nur Said, sang penulis buku ini mencoba menyoroti bagaimana sebuah bentuk pendekatan metodologi penafsiran terhadap suatu teologi bisa berimplikasi fatal: diskriminasi terhadap kaum perempuan sekaligus peniadaan peran sosial mereka secara berkesinambungan. Padahal jika mengacu kepada semangat awal kemunculannya, banyak kalangan yang mengimani agama sebagai pembawa spirit pembebasan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Pada awal – awal bab, buku ini secara sistematis memetakan seluruh masalah yang berhubungan dengan situasi obyektif perempuan Islam saat ini. Namun sebelum beranjak kepada situasi obyektif tersebut, terlebih dahulu penulis menekankan semangat dasar ajaran teologi Islam yang sebenarnya sama sekali tidak bertentangan dengan nilai – nilai HAM. Sambil mengutip kata –kata Durkheim : “*Religious forces are therefore human forces, moral forces*”, penulis mencoba meyakinkan bahwa Islam merupakan sebuah bentuk teologi yang sarat dengan nilai-nilai moral dan menentang secara total segala bentuk penindasan termasuk penindasan terhadap perempuan (halaman 5 – 8).

Ironi kemudian dimunculkan oleh penulis ketika buku ini memaparkan 5 contoh masalah – mulai praktek kekerasan terhadap perempuan golongan minoritas hingga praktek kekerasan yang melanda

Tak bisa dibantah, di tengah “kebingungan teologis” para perempuan Islam (baca: aktivis feminisme Islam) di Indonesia dalam mencari pijakan, buku ini setidaknya memberikan jawaban awal bagaimana sebuah teologi seharusnya bersikap terhadap kaum perempuan.....

ibu – ibu rumah tangga - yang menjadi fakta betapa ketertindasan kaum perempuan Islam di Indonesia bukan hanya sekedar isapan jempol belaka (hal. 62 – 71). Jika Moeslim Abdurrahman menyebut Islam sebagai sebuah bentuk “kritik sosial” dan Machasin menyebut Islam sebagai “teologi aplikatif” maka dari kenyataan–kenyataan tersebut penulis meyakini pasti ada sesuatu yang salah dari upaya pembumian nilai-nilai Islam itu sendiri di tengah masyarakat. Inilah yang menjadi “keresahan” penulis karena menurutnya : “...mengaitkan antara Islam dan HAM tidak cukup hanya berhenti pada pencarian basis normatif bahwa Islam tidak bertentangan dengan HAM, tetapi yang terpenting adalah konsistensi aktualisasi nilai–nilai Islam menghadapi isu–isu HAM dalam konteks tertentu (hal.6).

Penelusuran penulis untuk mencari pangkal masalah tersebut akhirnya berujung kepada teologi *Asy’ariyah* yakni sebuah teologi yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. *Asy’ariyah* dianggap bertanggungjawab terhadap segala bentuk kejudaman berpikir dalam Islam. Sebagai contoh misalnya penafsiran dogmatis dan *rigid Asy’ariyah* terhadap konsep takdir, nasib, pahala dan sikap pasrah, harus kita akui memiliki peran yang cukup signifikan terhadap semua bentuk praktek penindasan kaum laki – laki terhadap kaum perempuan di Indonesia.

Untuk itu ada dua bentuk tawaran dari penulis untuk “mempercepat” proses pemajuan teologi *Asy’ariyah*. *Pertama*, melalui jalan dekontruksi teologi secara bertahap. Artinya dalam waktu yang berkesinambungan harus diciptakan sebuah bentuk gaya penafsiran baru yang lebih kontekstual. Lalu pertanyaannya: Mengapa harus dekontruksi ? Sebab penulis percaya bahwa semangat dekontruksi secara perlahan akan mencairkan kebekuan teologi formal tradisional yang cenderung mempertahankan sebuah

simbol identitas kelompok serta memungkinkan munculnya teologi alternatif yang dalam terminologi penulis buku ini disebut sebagai teologi kritis. *Kedua*, menawarkan sebuah bentuk paradigma baru teologi Islam yang disebut sebagai teologi feminisme, yakni sebuah bentuk teologi yang “... *mengedepankan wacana keadilan dan egalitarianime dalam memperjuangkan kesejahteraan hidup bagi perempuan. Dengan semangat itu, teologi feminisme menjadikan iman (spirit keagamaan) sebagai framework atau tool of analysis terhadap masalah – masalah yang muncul dari pengalaman keagamaan dan keberagaman yang cenderung diskriminatif dari sudut pandang perempuan* “ (hal.120 –121).

Kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini adalah bagaimana mencari sebuah bentuk konsep teologi Islam yang relevan bagi penegakan Hak Asasi Perempuan di Indonesia di tengah situasi ketertindasan kaum perempuan itu sendiri.

Tak bisa dibantah, di tengah “kebingungan teologis” para perempuan Islam (baca: aktivis feminisme Islam) di Indonesia dalam mencari pijakan, buku ini setidaknya memberikan jawaban awal bagaimana sebuah teologi seharusnya bersikap terhadap kaum perempuan yang sebenarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum laki–laki dalam beribadah kepada Tuhan.

Dari sisi kebutuhan akan referensi, sejujurnya kehadiran buku ini sudah benar. Walaupun demikian, tak ada gading yang tak retak. Kritik tetap harus dilontarkan terhadap buku ini yang menurut saya berlaku “tidak adil” dengan hanya “mengadili” teologi *Asy’ariyah* semata. Padahal jika penulis buku ini sudah “memberanikan diri” mencantumkan kata “teologi” tanpa ada embel–embel lain dalam judul buku ini, maka konsekwensinya dia pun harus berani “mengadili” secara kritis pula teologi – teologi yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia semisal Syi’ah, Mutazilah, Wahabi dan lain sebagainya.

Namun terlepas dari itu semua, buku “*Perempuan, dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*” merupakan buku yang sangat penting untuk dibaca tidak hanya oleh para feminis Islam dan pemerhati masalah–masalah perempuan namun juga penting dibaca pula oleh para Ustadz, Ustadzah, Kyai, Nyai dan para dai yang secara aktif berdakwah di tengah masyarakat. Semoga lewat buku ini, kita berharap - meminjam kata-kata Paolo Coelho dalam sebuah novelnya–teologi mengembalikan apa yang pernah menjadi milik perempuan. Semoga. ✿ (yoan)

Pulang

Oleh : Alda Kusuma

Perempuan itu bernama Markonah. Orang-orang kerap memanggil namanya Onah. Kampungnya bernama Sukaresmi, sebuah desa terpencil di daerah Ciamis sana. Hari ini ia memutuskan untuk meninggalkan kampung halaman dan mengadu nasibnya di Jakarta. Onah telah bertekad untuk mengubah jalan hidup dengan merantau menjadi tenaga kerja. Ditambah dia ingin segera menghapus kenangan pahit bersama suaminya yang kenyataannya telah menikahi perempuan lain di daerah Purwakarta sebagai isteri keduanya. Onah memang pernah merasa maklum karena sebagai sopir truk, suaminya menjadi sering berada di jalan dan jarang berada di rumah, apalagi bercakap-cakap dengannya. Namun, kehadiran Asep anaknya semata wayang telah membuatnya memiliki keberanian untuk menginjakkan kakinya merantau ke kota metropolitan.

“Jaga dirimu baik-baik ya, Nak. Emak mau pergi ke Jakarta, cari duit banyak. Biar bisa buat beli baju, mainan, dan sekolah Asep. Emak mau Asep pinter *nggak* kaya emak,” kata Onah.

“Emak mau ke Jakarta, ya?Ati-ati di jalan ya, Mak?Nanti kalau ‘Cep kangen ama Emak gimana?’Cep jadi cuka anis... (maksudnya jadi suka nangis), ” jawab Asep anaknya dengan logat cadel.

“Lho, Asep kan anak jagoan emak. Masak Asep nangis sih? Asep *nggak* boleh sedih, kalau Asep sedih nanti Emak juga sedih. Udahan ya Cep. Emak pergi dulu. Kalau Emak pulang, Asep harus tambah pinter,” katanya sambil mencium dan memeluk si kecil Asep.

“Jaga dirimu, ya Neng. Do’a aku bersamamu.” Kata Nyi Supi, Ibu kandung Onah.

Onah telah pamit pada Ajengan Marhaban, seorang tokoh agama yang disegani

di kampung itu. Ajengan hanya bilang, bahwa ia harus tetap rendah hati, bersabar, dan menyerahkan segalanya kepada Allah SWT. Makanya, ia mantap ketika Kang Juki mengajaknya ke Jakarta dan menjanjikan padanya untuk bekerja di Pabrik Sepatu. Tetapi, ketika sampai di Jakarta, Kang Juki ternyata mengatakan padanya bahwa lowongan kerja di pabrik sepatu sudah tutup. Agar perjuangannya tak sia-sia, Kang Juki menawarkan padanya untuk mendaftar sebagai calon TKW ke Timur Tengah pada PT. Maju Terus Tekad Mulia, sebuah lembaga penyalur tenaga kerja Indonesia (PJTKI).

Belakangan Onah baru mengetahui kalau Kang Juki ternyata seorang calo TKI. Ia memanfaatkan posisi Ajengan Marhaban yang entah tahu atau tidak tentang sepak terjang Kang Juki selama ini. Di mata Ajengan Marhaban, mencari uang untuk menghidupi keluarganya dengan bekerja di Arab identik dengan pergi ke tanah suci. Syukur-syukur bila

Belakangan Onah baru mengetahui kalau Kang Juki ternyata seorang calo TKI. Ia memanfaatkan posisi Ajengan Marhaban yang entah tahu atau tidak tentang sepak terjang Kang Juki selama ini. Di mata Ajengan Marhaban, mencari uang untuk menghidupi keluarganya dengan bekerja di Arab identik dengan pergi ke tanah suci.

Onah bosan berada di rumah majikannya. Abah Salim memiliki 10 orang anak yang kesemuanya harus diurusnya. Kadang ketika Onah melihat Amir, kakak dari anak bungsu majikannya yang kini berumur lima tahun, ia sering teringat pada Asep, anak kesayangannya.

nantinya dapat kesempatan untuk umroh ataupun menunaikan ibadah haji. Tapi mungkin juga Ajengan adalah seorang Kyai kampung yang lugu, yang juga tidak pernah membayangkan bagaimana kerasnya Qatar. Sebuah negeri ladang minyak di tengah gurun tempat ia bekerja sekarang. Memori Ajengan hanya berisi indahnya *thawaf, sa'i*, melempar *jumroh* dan berbagai ritual lainnya yang Beliau ikuti ketika menunaikan ibadah haji. Bagi beliau, tanah Arab dimanapun adalah sama saja. Tanah suci dimana orang dapat menjalankan ibadahnya dengan *khusyu'* dan rasa gembira. Tak ada bayangan sama sekali, bahwa daging kalkun, kambing, dan unta sangat mempengaruhi temperamen orang-orang yang hidup dalam lingkungan yang keras di gurun sana.

Onah bosan berada di rumah majikannya. Abah Salim memiliki 10 orang anak yang kesemuanya harus diurusnya. Kadang ketika Onah melihat Amir, kakak dari anak bungsu majikannya yang kini berumur lima tahun, ia sering teringat pada Asep, anak kesayangannya. Dilakoninya semua pekerjaan mulai dari mengepel, memasak, menyeterika, mencuci mobil, mengurus keperluan anak-anak majikannya, bahkan sampai pada hal-hal yang

tidak pernah dia pikirkan seperti menggunting kuku dan memasang inai (pacar pewarna kuku) isteri majikannya dan juga memandikan onta. Abah Salim adalah majikannya yang ketiga setelah ia 2 kali berganti majikan. Ketika bekerja pertama kali di majikan pertama, ia dicemburui oleh isteri majikannya sehingga sering dibentak-bentak dengan bahasa Arab yang dia tidak tahu artinya sampai diguyur air seember sehingga baju dan badannya basah semua. Setelah itu isteri majikannya mengajak suaminya untuk memulangkan Onah kepada agennya di sana. Majikannya yang kedua, adalah seorang lelaki yang memiliki tiga isteri dengan karakter yang teramat berbeda. Yang satu pemaarah, yang kedua sakit-sakitan, dan yang ketiga adalah pesolek yang pekerjaannya berdandan sepanjang hari. Babah Toyib demikian Onah mengenalnya. Namun ternyata Babah Toyib memang mata keranjang, tidak cukup dengan ketiga isterinya, Onah pun menjadi incarannya. Hingga pada suatu hari Babah mengendap-endap dan mengintip Onah yang sedang berganti baju di kamarnya. Babah berusaha membuka pintu kamar dan berniat memperkosa Onah. Untunglah Onah segera tahu dan berteriak. Keesokan harinya, ia minta dipulangkan pada agen hingga akhirnya bekerjalah ia pada majikannya yang ketiga.

Mengenang semua ini, tiba-tiba Onah memiliki keberanian untuk berbicara pada majikannya. Ia mengutarakan niatnya untuk pulang ke Indonesia.

“Abah Salim, “ katanya pada majikannya yang sedang membaca koran *Al Joumhouriyya*.

“*Na'am Onah. Maadzaa turriid?*” (YA Onah, apa yang kamu inginkan) kata Abah Salim sambil menanyakan apa keinginannya.

“*Ana urriid ilaa Indonesia, Abah. A'thinii fuluusi ,*” (Saya ingin pulang ke Indonesia, Abah, berikanlah uang gaji saya) Kata Onah dengan bahasa Arab sekenanya.

“*Ghadan, Onah. Ma'indii fuluus al-aan.*” (Besok Onah, saya nggak punya uang sekarang).

"*Indaka fuluus, Abah. Kuntu sanataini huna. Uriid arrujuu', Abah.*" (Kamu punya uang Abah, aku sudah 2 tahun di sini. Aku mau pulang, Abah), jawab Onah *ngeyel*.

Melihat kegigihannya Abah Salim menyerah. Seminggu kemudian, ia dipulangkan ke agennya dan diurus kepulangannya ke Indonesia. Abah Salim memberikan uang sejumlah 8.000 real. Kalau dirupiahkan, kira-kira berapa ya jumlahnya? Onah tak dapat membayangkan. Karena yang terlintas dalam benaknya hanya Asep dan Nyi Supi, kedua orang yang dikasihinya.

Akhirnya Markonah pulang ke Indonesia. Ia tak dapat membayangkan hal apapun kecuali bertemu dengan orang-orang tercinta. Ia juga sama sekali tidak tahu, kalau Rafiq agennya yang di Qatar telah memberinya bauan dan minuman yang membuatnya tak sadarkan diri. Ia juga tidak tahu kalau Rafiq telah merampas sebanyak 5.000 real uangnya dan menyisakan 3.000 real untuknya. Entah apalagi yang telah dirampas Rafiq darinya, karena ketika sadar ia mendapat dirinya tergeletak di depan pintu toilet dalam keadaan yang berantakan. Onah hanya bisa menangis dan berdo'a. "*Laa haulaa wa laa quwwata illa billaah*". Tak ada daya dan kekuatan kecuali hanya dari-Mu, Ya Allah. Sampai akhirnya ia ditemukan oleh seorang aktivis dari sebuah lembaga buruh migran yang baru saja mengikuti sebuah konferensi internasional di Doha dan akhirnya pulang bersamanya.

Setibanya di Bandara Soekarno Hatta, ia mencoba mengabari orang rumahnya. Sayang, Nyi Supi tak dapat menerima teleponnya karena ia tak dapat berjalan ke rumah Pak RT dimana ia selalu berusaha untuk mengirimkan kabarnya. Hanya Pak RT lah yang punya telepon. Oleh karena itu, hanya pada beliaulah ia berharap kabar tentangnya selama ini bisa tersampaikan.

Dari jauh terdengar suara langkah kaki seorang anak kecil yang tengah berlari menuju

ruangan. Orang-orang meneriakinya dengan gegap gempita.

"Asep, ini telepon dari Emakmu, Sep."

"Apa? Emak Asep pulang? Hore Emak Asep pulang, Emak Asep pulang".

Tiba-tiba, seluruh rasa sakit Onah mendadak hilang. Di gagang telepon, ia berteriak pada Asep yang ada di seberang gagang telpon yang menghubungkannya.

"Asep ini Emak, Sep. Emak pulang, Sep. Emak sudah kangen sama Asep."

"Asep juga kangen sama Asep. Emak dimana? Nenek sekarang lagi sakit, Mak." Kata Asep yang sekarang sudah hilang suara cadelnya.

"Iya, Emak pasti pulang untuk bertemu Asep dan Nenek. Tunggu ya, Sayang." Lalu telepon tiba-tiba tertutup.

Jarak antara Jakarta-Ciamis mendadak terasa begitu jauh, sejauh Jakarta-Qatar. Perjalanan terasa begitu lama. Tapi seperti kata Ajengan, aku akan bersabar mengikuti laju keretaku. Aku akan bertemu dengan Asep dan Emak. Dan aku ingin membagi pengalamanku pada orang-orang di kampung, dan menceritakan berbagai hal pada mereka. Bahwa rumput di halaman orang lain seringkali lebih hijau daripada rumput di halaman kita sendiri. Berbekal uang yang tersisa, aku akan membuka usaha dan berusaha hidup di kampungku sendiri. Dan bersama dengan teman-teman yang senasib denganku, aku akan berusaha untuk membuat sebuah kondisi dimana pilihan hidup di negeri orang, tak akan selalu menyeramkan. Karena sebagai warga negara, dimanapun kita selalu membutuhkan perlindungan dari negara dan pemerintahnya. Bukan sekedar dipersalahkan karena ketidaktahuan dan kebodohan kita. Tugas pemerintahlah untuk menghapuskan segala tindak kekerasan yang dialami warganya. ❀

(Terimakasih pada Mbak Cucu dan Mbak Badriyah yang telah menjadi inspirasi kisah ini).



Bagaimana Islam Menyikapi Masalah Kemiskinan?

Oleh: Ala'i Najib, MA

Pertanyaan;

Bagaimana Islam menyikapi masalah kemiskinan, apakah negara wajib memelihara warga miskinnya? Lalu apa hukumnya jika negara membiarkan warganya dalam kemiskinan hingga para perempuan menjadi korban perdagangan (trafficking), menimbulkan kekerasan, korupsi dll.

(Nuri, Sleman).

Jawaban;

Saudari Nuri, sampai hari ini, pembebasan riil yang ingin kita lakukan dan agenda mendesak bangsa kita adalah memerangi kemiskinan. Menurut ekonom dan ahli kependudukan, kemiskinan adalah bentuk **kekerasan yang paling fundamental** yang dialami manusia. Karena itulah i'tikad baik untuk menghapusnya datang dari masyarakat maupun pemerintah. Pemerintah sendiri secara kolektif bersama-sama dengan lembaga lembaga lain, kita melihatnya mencoba mengatasi itu. Bahkan kemiskinan yang juga menjadi persoalan di banyak negara menjadi agenda khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan pencanangan MDGs (*Millenium Development Goals*), dimana point-pointnya menjadi agenda dan aksi negara negara yang menghadapi problem kemiskinan. Indonesia sendiri 'mentargetkan' bebas dari kemiskinan tahun 2020.

Undang-undang kita sendiri secara jelas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.

Dalam banyak aspek, agama tentu saja punya pesan moral atau sesuatu yang bersifat wajib (*fardlu 'ain*) untuk mengatasinya. Secara umum, Nabi sendiri mengingatkan *Kadal fakru al-Yakuuna Kufran*, kadang-kadang kemiskinan itu dekat kepada kekufuran. Nabi mengingatkan ini karena biasanya miskin yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah miskin materi. Sedangkan keberlangsungan untuk menjalankan agama harus dulu dipenuhi kebutuhan dasarnya / *basic need*.

Bahkan dikisahkan jaman dulu, ada seseorang

...tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, secara jelas memikul tanggung jawab untuk meringankan kaum miskin, Qur'an (surah al-maun) dengan tegas memberi sanksi sebagai pendusta agama apabila lalai terhadap kaum miskin dan anak-anak yatim.

yang akan menunaikan haji, namun tetangga kanan kirinya, adalah orang miskin yang sampai tidak mampu makan, lalu ia sumbangkan seluruh hartanya yang akan dipakai untuk haji itu kepada orang miskin, ia merasa tak pantas menunaikan haji, sementara tetangganya miskin. Karena itulah kemudian pahala sedekahnya sama dengan haji mabrur.

Selain itu, tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, secara jelas memikul tanggung jawab untuk meringankan kaum miskin, Qur'an (surah al-maun) dengan tegas memberi sanksi sebagai pendusta agama apabila lalai terhadap kaum miskin dan anak-anak yatim.

Apa sebenarnya kewajiban pemerintah atau imam?

Pemerintah wajib menyejahterakan rakyat, Imam Syafi'i mengatakan dan memberlakukan satu kaidah yang terkenal dalam menjawab problem itu yaitu, *'tasharruf al imam 'ala al-ro'iyah manuthun bi al-maslahah* (Kitab al-ashbah wa al-nadhair, hal. 278) artinya, kebijakan yang dilakukan pemerintah pada rakyatnya harus sesuai dengan masalah (kebaikan

(*'tasharruf al imam
'ala al- ro'iyah
manuthun bi al-
masalahah*) kebijakan
yang dilakukan
pemerintah pada
rakyatnya harus sesuai
dengan masalah
(kebaikan bersama)

bersama). Bahkan kedudukan seorang imam (kepala negara) itu seperti walinya anak yang yatim, ini mengandaikan kemutlakan pemerintah menjamin kesejahteraan rakyatnya. Sebelum Imam Syafi'i, Umar bin Khatab juga pernah berkata hal yang serupa, inilah nampaknya yang menjadi tendensi Imam Syafi'i melakukan hal yang sama. Selain itu ada hadis; *Al-Sulthonu Waliyyu man la waliyya lahu*, seorang penguasa itu adalah pelindung bagi orang yang tidak mempunyainya. Memperkuat itu, Imam Mawardi (*al-Ahkam al-Sulthoniyah, hal.16*) mengatakan bahwa sebagian tugas pemerintah adalah menjaga masyarakat dari kerusakan dan dirusak (diganggu) orang lain.

Sementara itu imam Hasan Bashri, tokoh sufi yang terkenal, pernah memberikan nasehat kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz; kepala negara yang adil itu seperti seorang gembala, melindungi gembalaannya dari hewan yang buas, memberinya makan dan selalu menjaganya. Kepala negara yang adil juga seperti seorang Ibu kepada anaknya, dia mengasuhnya, memelihara dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kepala negara juga adalah seorang bendahara bagi anak-anak yatim dan orang fakir, kepala negara adalah khalifah yang berdiri di antara Allah dan hamba-hambanya.

Pada akhirnya, rambu-rambu atau kaidah yang diijtihadi para Ulama itu adalah untuk mencegah *mafsadah* (kerusakan) yang lebih jauh. Idealnya kalau pemerintah sudah mampu menciptakan kesejahteraan di negeri sendiri, tentulah tidak ada *trafficking*. Kalaupun ada yang dikirim ke luar negeri untuk bekerja, mereka adalah yang mempunyai keahlian tertentu. Begitu juga mental korup, insya allah. ❁ *Wallahu a'lam.*

Selamat Idul Fitri

1426 H/2005 M

Mohon
Maaf
Lahir
Batin

keluarga besar
Rahima

Sudahkah Perempuan Merdeka?

Oleh Maman A. Rahman

Peran orang tua terhadap masa depan anak sungguh sangat besar. Bahkan sangat berpengaruh dalam menentukan keyakinan seseorang dikemudian hari. Cara mendidik dan perilaku orang tua berpengaruh terhadap perilaku anak di masa yang akan datang.

Sebagian orang tua mempunyai kebiasaan menindik bayi perempuan dan memasang anting-anting di daun telinganya sebagai tanda bahwa anaknya adalah seorang perempuan. Tidak cukup di situ, sejak masih anak-anak sudah diarahkan agar berperilaku lemah-lembut, tidak boleh protes, bekerja di dapur, dan lain sebagainya. Dari segi permainan diarahkan agar bermain rumah-rumahan dan boneka-bonekaan. Tidak sedikit orang tua yang memarahi anaknya ketika si anak bermain gasing, kelereng, sepakbola dan masih banyak permainan lagi yang dianggap "permainan anak laki-laki".

"Kebiasaan" lain yang dilakukan pada bayi perempuan adalah membuang sebagian anggota genitalnya seperti yang terjadi pada anak laki-laki atau yang biasa disebut dengan *sunat perempuan*. Karena Sunat tidak hanya dilakukan kepada anak laki-laki, tapi juga perempuan, begitu keyakinannya. Konon sunat perempuan dilakukan untuk mengurangi hasrat seksual perempuan yang tinggi. Sudah sejak bayi, perempuan dibatasi, dikurangi potensi kenikmatannya.

Ketika anak mulai sekolah, peran orang tua masih sangat besar. Seringkali dijumpai keinginan orang tua mengalahkan pilihan anaknya. Seakan orang tua mengetahui segalanya dan kebenaran seakan hanya milik orang tua. Dengan berdalih "untuk kebaikan anaknya di kemudian hari", orang tua menentukan kehendak pada anaknya sendiri. Orang tua menentukan di mana anak harus sekolah, menentukan jurusan apa yang akan dipilih, dan bahkan dengan siapa



harus berteman. Wow, sebegitu berkuasakah orang tua terhadap anaknya?

Peran orang tua masih terus membayangi anak pada saat menentukan pilihan pasangan hidupnya. Tidak sedikit perempuan yang menderita seumur hidupnya karena harus menikah dengan pasangan yang bukan menjadi pilihannya, tetapi pilihan kedua orang tuanya. Sekali

lagi orang tua menggunakan "senjata" bahwa ini "untuk kebaikan anak di kemudian hari". Pada golongan keluarga tertentu yang menganggap bahwa keluarganya merupakan keturunan orang mulia, mereka akan menghalangi anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang dianggap bukan dari golongan atau kelasnya. Bahkan sering terjadi perpecahan keluarga karena sang anak perempuan menentukan pasangan hidup sesuai dengan pilihannya. Tragis *nian* akibatnya.

Setelah berumah tangga, perempuan seringkali mengalami pemaksaan-pemaksaan oleh pasangan hidupnya ataupun oleh kondisi sosialnya. Ditentukan untuk menetap di rumah mengurus rumah tangga atau bekerja keluar rumah untuk mencari nafkah seringkali dalam kondisi serba dipaksakan. Pilihan untuk menjadi ibu rumah tangga atau memilih bekerja di luar rumah adalah pilihan yang bebas. Biarkan perempuan menentukan pilihannya, tanpa harus ada paksaan. Ketika sang suami meminta untuk berhubungan seks, tidak sedikit perempuan tak kuasa untuk mengelak saat kondisinya tidak siap, karena akan berhadapan dengan tafsir-tafsir agama yang memojokkan perempuan atau ancaman kekeerasan.

Dengan melihat kasus-kasus di atas, layakkah kita berteriak "merdeka!". Masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan, masih banyak hak-hak perempuan yang perlu diperjuangkan demi menuju kemerdekaan yang hakiki lahir batin. *Wallahu 'alam.* ❁